

KOMUNIKASI POLITIK

**Iswadi
Muhammad Yusuf AR
Alexander Pramono
Maulana Malik Ibrahim
Joko Tri Nugraha
Muhammad Nur Rofiq**



GET PRESS INDONESIA

KOMUNIKASI POLITIK

Penulis :

Iswadi
Muhammad Yusuf AR
Alexander Pramono
Maulana Malik Ibrahim
Joko Tri Nugraha
Muhammad Nur Rofiq

ISBN :

Editor : Ari Yanto., M.Pd

Penyunting : Yuliatr Novita., M.Hum

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Komunikasi Politik ini.

Buku Ini Membahas Definisi Komunikasi Politik, Peran Media Massa, Opini Publik, Kepemimpinan Politik, Kebijakan Publik, Kasus-kasus Studi Komunikasi Politik.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENGERTIAN KOMUNIKASI POLITIK	1
1.1 Defenisi Komunikasi.....	1
1.2 Defenisi Ilmu Politik.....	2
1.3 Defenisi Komunikasi Politik	5
1.4 Pengertian Komunikasi Politik Menurut Para Ahli	5
1.5 Distorsi Komunikasi Politik.....	9
1.6 Model Komunikasi Politik	9
1.7 Komponen dalam Komunikasi Politik.....	11
1.8 Fungsi Komunikasi Politik	12
DAFTAR PUSTAKA.....	14
BAB 2 PERAN MEDIA MASSA DALAM KOMUNIKASI POLITIK.....	15
2.1 Pendahuluan.....	15
2.2 Media Massa dan Karakteristiknya.....	17
2.2.1 Media Cetak.....	18
2.2.2 Media Elektronik.....	18
2.2.3 Media Online.....	20
2.2.4 Media Sosial	21
2.3 Memahami Komunikasi Politik.....	23
2.4 Media sebagai Saluran Komunikasi Politik	23
2.5 Tren Penggunaan Media dalam Komunikasi Politik.....	27
2.6 Penutup	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29
BAB 3 OPINI PUBLIK	31
3.1 Pendahuluan.....	31
3.2 Pengertian Opini Publik.....	33
3.2.1 Tahap Pembentukan Opini Publik	34
3.2.2 Karakteristik Opini Publik.....	36
3.3 Prinsip-prinsip Opini Publik ditinjau dari Aspek Psikologi, Sosiologi, dan Lingkungan	39
3.3.1 Pendekatan Opini Public Secara Psikologis.....	39
3.3.2 Pendekatan Opini Publik Secara Sosiologis.....	41

3.3.3 Pendekatan Opini Publik Secara Lingkungan..	44
3.4 Pentingnya Kebijakan dalam Opini Publik	47
3.4.1 Kebijakan Sosial	47
3.4.2 Kebijakan Ekonomi.....	51
3.4.3 Kebijakan Politik.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	54
BAB 4 KEPEMIMPINAN POLITIK:	55
4.1 Pendahuluan.....	55
4.2 Dinamika Kepemimpinan Politik Presiden dari Masa ke Masa	57
4.2.1 Sukarno: Kepemimpinan Politik ‘Orang Besar’ dan Demokrasi Terpimpin	57
4.2.2 Soeharto: Otoritarianisme, Aparatus Negara, dan Depolitisasi Massa	59
4.2.3 B. J. Habibie: Demokratisasi Kepemimpinan Politik Pasca Orde Baru	61
4.2.4 Gus Dur dan Megawati: Kemelut Perebutan Kepemimpinan Politik dan Politik-Kebijakan .	63
4.2.5 Susilo Bambang Yudhoyono: Kepemimpinan Kharismatik-Demokratis dan Stagnasi Politik- Demokrasi	66
4.2.6 Joko Widodo: Kepemimpinan Transformasional dan Regresi Demokrasi	68
4.3 Penutup dan Simpulan.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
BAB 5 KEBIJAKAN PUBLIK	75
5.1 Pendahuluan.....	75
5.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	77
5.3 Kebijakan dan Kepentingan Publik.....	82
5.4 Kategori Administrator Publik.....	84
5.5 Policy Cycle	85
5.6 Penutup	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
BAB 6 KASUS-KASUS KOMUNIKASI POLITIK	91
6.1 Pendahuluan.....	91
6.2 Kasus-Kasus Komunikasi Politik	91
6.2.1 Kasus-Kasus Komunikasi Politik di Tingkat Nasional.....	92

6.2.2 Analisis Kasus Pilpres: Berebut Pengaruh
di Ruang Digital 100

DAFTAR PUSTAKA..... 102

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1. Total Interaksi Pasangan Capres-Cawapres di Tik-Tok	93
Gambar 6.2. Analisis Pasangan Anies-Cak Imin.....	94
Gambar 6.3. Analisis Pasangan Prabowo-Gibran.....	95
Gambar 6.4. Analisis Pasangan Ganjar-Mahfud.....	96
Gambar 6.5. Analisis Total Post Kandidat Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024.....	97
Gambar 6.6. Total Interaksi Ketiga Pasangan Kandidat.....	98

BAB 1

PENGERTIAN KOMUNIKASI POLITIK

Oleh Iswadi

1.1 Defenisi Komunikasi

Penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui atau tanpa media disebut komunikasi secara sederhana. Komunikasi secara sederhana adalah pertukaran ide atau gagasan. Oleh karena itu, komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian ide atau pesan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan mencapai kesepakatan tentang ide atau pesan yang disampaikan. Berkomunikasi, menurut Thomas M. Scheiwadael dalam Mulyana (2001), adalah proses menyatakan dan mendukung identitas diri, membangun kontak sosial dengan orang sekitar, dan mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, dan berperilaku seperti yang diinginkan oleh uang.

Empat prinsip utama komunikasi, menurut Seiler (dalam Arni, 2007), adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi adalah proses yang selalu berubah dan dapat berubah sesuai dengan keadaan.
2. Komunikasi adalah sistem, artinya terdiri dari berbagai bagian yang berhubungan satu sama lain dan melakukan tugas masing-masing.
3. Komunikasi adalah interaksi dan transaksi, artinya terjadi proses saling tukas.
4. Komunikasi dapat terjadi dengan sengaja maupun tidak disengaja.

Menurut Wahyu (2010), ada tiga bagian komunikasi:

1. Komunikator sebagai pengirim pesan: Seseorang atau organisasi yang menghasilkan pesan dan menyampaikannya kepada khalayak melalui media massa dan saluran komunikasi disebut komunikator atau sumber.

2. Pesan sebagai pernyataan yang didukung oleh lambang: Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator melalui berbagai media sesuai dengan tujuannya. Ini dapat berupa informasi umum, berita, iklan, film, hiburan, dan sebagainya.
3. Media atau saluran yang mendukung pesan: Media adalah alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator untuk mengirimkan pesan kepada khalayak. Karena karakteristiknya, media dapat mencapai khalayak secara besar, serempak, dan cepat, dan dapat menghasilkan efek secara langsung maupun tidak langsung.
4. Publik sebagai penerima pesan dan target komunikator: Publik bukan hanya sasaran pesan; mereka juga adalah individu atau kelompok yang memahami pesan dan memberikan maknanya. Pemahaman publik dapat memengaruhi proses komunikasi dan tanggapan yang dihasilkannya.
5. Efek atau dampak pesan: Apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima pesan setelah menerima pesan disebut efek. Ini dapat ditunjukkan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk pikiran, perasaan, atau tindakan penerima.
6. Umpan balik mengacu pada tindakan atau tanggapan yang diambil oleh penerima pesan setelah terpengaruh oleh proses komunikasi. Penonton dapat menginterpretasikannya sebagai respons atau reaksi yang mereka berikan, dan hal ini sangat penting untuk menentukan seberapa efektif pesan disampaikan.

1.2 Defenisi Ilmu Politik

Meriam Budardjo mengatakan bahwa ilmu politik adalah bidang yang mempelajari bagaimana perpolitikan dilakukan. Politik adalah upaya untuk menjalani kehidupan yang baik. Politik dapat dipahami dari perspektif negara, kekuasaan kebijakan umum, pengambilan keputusan, dan pembagian.

Menurut Rogers F. Soltau (1961:99), ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara Negara dan cara ia melakukan tugas dan fungsinya. Menurut J. Barends, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari terkait Negara dan cara ia melakukan tugas dan fungsinya.

Menurut Harold Laswel dan Abraham Kaplan (1986), ilmu politik menyelidiki bagaimana kekuasaan dibentuk dan dibagi. Politik, menurut Andrew Heywood, adalah upaya suatu negara untuk membuat, mempertahankan, dan mengubah regulasi umum yang mengatur kehidupan tanpa mengesampingkan konflik dan kerja sama yang mungkin terjadi. Robson mendefinisikan ilmu politik sebagai penelitian tentang bagaimana, mengapa, di mana, bagaimana, dan bagaimana kekuasaan terjadi dalam masyarakat. Selain itu, fokusnya adalah perjuangan untuk mengambil atau mempertahankan kekuasaan dan menerapkannya.

Pada perspektif pengambilan keputusan menurut Joyce Mitchell, Politik adalah membuat keputusan untuk seluruh masyarakat. Namun, Karl W. Deutsch menyatakan bahwa politik adalah proses pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan jenis ini berbeda dengan keputusan yang dibuat secara pribadi dan mengenai apakah secara keseluruhan dilakukan di sektor umum atau sektor publik.

Hoogerwerf mengatakan bahwa kebijakan pemerintah, proses pembentukannya, dan akibatnya adalah subjek ilmu politik dari perspektif politik dari aspek kebijakan umum. Di sini, Kebijakan umum adalah contoh usaha untuk meningkatkan masyarakat melalui penggunaan kekuasaan. Namun, menurut David Easton, ilmu politik berpusat pada penelitian tentang bagaimana kebijakan umum dibuat. Ia berpendapat bahwa kehidupan politik mencakup kegiatan yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan oleh pihak berwenang masyarakat dan cara kebijakan dilaksanakan. Dari sudut pandang alokasi dan distribusi, D. Harold Laswell mengatakan bahwa politik adalah tentang siapa yang menerima apa, kapan, dan bagaimana itu diberikan. Meskipun demikian, David Easton mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi yang mengatur

penyebaran nilai-nilai secara otoritatif, yang dilakukan atas nama masyarakat dan berdasarkan otoritas.

Menurut Andrew Heywood, Politik adalah seni pemerintahan, urusan publik, negosiasi, kesepakatan, dan penggunaan kekuasaan politik. "Polis" dan "kota praja" adalah etimologi dari kata "politik". Masyarakat Yunani kuno terbagi menjadi kota-kota independen dengan pemerintahan sendiri. Dalam situasi seperti ini, politik dianggap sebagai masalah negara. Pada dasarnya, memahami politik berarti memahami pemerintahan, atau secara lebih luas, siapa yang memegang kekuasaan. Kejadian yang terjadi di dalam organisasi pemerintah, terutama di departemen pemerintah, kabinet, lembaga legislatif, dan tempat lainnya, termasuk dalam kategori politik. Ini juga mencakup bagian masyarakat tertentu, terutama politisi. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk politik, Aristoteles berpendapat bahwa kehidupan yang baik hanya dapat dicapai dalam masyarakat politik. Politik dapat didefinisikan sebagai ilmu dasar pemerintahan atau sebagai tindakan etis untuk menciptakan masyarakat yang adil. Perbedaan konvensional antara domain publik dan domain pribadi menggambarkan perbedaan antara negara dan masyarakat sipil. Karena tanggung jawab mereka untuk mengatur kehidupan masyarakat, lembaga pemerintahan, pengadilan, kepolisian, angkatan bersenjata, sistem keamanan sosial, dan organisasi lainnya dianggap sebagai lembaga publik. Sebaliknya, komunitas swasta yang dibentuk dan dibiayai secara individu disebut masyarakat sipil. Masyarakat sipil termasuk keluarga, perusahaan swasta, serikat pekerja, kelompok masyarakat, dan sebagainya.

Dengan melihat politik sebagai tempat konflik dan kesepakatan, kita dapat mengatakan bahwa politik adalah cara untuk menyelesaikan konflik melalui negosiasi, perdamaian, dan kompromi daripada menggunakan kekerasan atau senjata. Bernard Crick, seperti yang dikutip oleh Heywood (2014:13), menyatakan bahwa politik adalah tindakan di mana berbagai kepentingan dalam suatu entitas pemerintahan didamaikan dengan memberi mereka bagian kekuasaan yang sebanding

dengan peran mereka dalam menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup seluruh masyarakat.

1.3 Defenisi Komunikasi Politik

Komunikasi politik biasanya didefinisikan sebagai komunikasi yang mengandung pesan politik. Dalam komunikasi politik, ada beberapa pelaku atau tokoh politik yang bertindak baik sebagai pengirim maupun penerima pesan. Selain itu, tujuan politik, yaitu penguasaan kekuasaan, sangat terkait dengan media politik dan pesan politik. Komunikasi politik tidak selalu rumit atau panjang. Sebagai contoh, berbicara tentang seorang pemimpin negara, memberikan dukungan, membicarakan kebijakan pemerintah, dan hal-hal lainnya dapat diklasifikasikan sebagai komunikasi politik.

Menurut para ahli, definisi umum komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pelaku politik dan pesan politik. Kekuasaan, kebijakan pemerintah, dan tata pemerintahan sangat berkaitan dengan komunikasi politik. Hampir setiap orang terlibat dalam aktivitas komunikasi politik dalam kehidupan sehari-hari, dan komunikasi politik terkadang terkesan formal atau memiliki pesan yang serius. Masyarakat seringkali tidak menyadari keterlibatan mereka dalam analisis dan studi komunikasi politik.

1.4 Pengertian Komunikasi Politik Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah penjelasan beberapa ahli tentang apa itu komunikasi politik menurut perspektif mereka:

1. Mueller (1973)

Mueller mengartikan komunikasi politik hanya berdampak politik ketika fokusnya pada hasilnya. Namun, dengan memperhatikan peran komunikasi politik dalam sistem politik, komunikasi terjadi di dalam sistem politik dan mencakup interaksi antara sistem dan lingkungannya.

2. Almond dan Powell

Almond dan Powell menjelaskan bahwa dalam sistem politik, komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai

elemen politik tetapi juga melakukan berbagai fungsi lain, seperti pengumpulan, pengungkapan, perekrutan, dan pendidikan politik. Komunikasi politik dianggap sebagai syarat atau keharusan untuk melakukan fungsi politik lainnya

3. Dr. Rusadi Kartaprawira

Komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai pertukaran gagasan politik di seluruh masyarakat, yang mencakup kelompok, asosiasi, lembaga, dan sektor dalam kehidupan politik pemerintahan. Rusadi menyatakan bahwa komunikasi politik dapat dianggap sebagai cara untuk membangun politik. Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi politik membangun dasar untuk mempelajari masalah yang ada serta proses keseluruhan untuk mengubah politik suatu negara.

4. Fagen (1966)

Dilihat dari dampaknya, relevansinya, dan kemungkinannya untuk terlibat dalam sistem politik, Fagen menganggap komunikasi politik sebagai jenis komunikasi yang bersifat politis.

5. Meadow (1980)

Menurut Meadow, Komunikasi politik adalah cara simbol dan pesan disampaikan, yang sebagian besar dipengaruhi oleh pelaku dalam interaksi komunikasi. Komunikasi politik juga mempengaruhi sistem politik.

6. Roelofs

Roelofs memberi definisi yang lebih sederhana dari komunikasi politik, yang berarti berbicara tentang politik atau melakukan kegiatan politik melalui percakapan.

7. Miriam Budiardjo

Menurut Budiardjo, salah satu fungsi partai politik adalah komunikasi politik, yaitu menyampaikan berbagai pendapat dan keinginan masyarakat dan mengatur keinginan tersebut. Komunikasi politik juga melibatkan proses merumuskan dan menggabungkan kepentingan yang bermanfaat untuk mendukung kebijakan publik.

8. Rauf

Karena komunikasi politik terjadi secara empiris dalam kehidupan sosial, maka komunikasi politik adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh aktor politik untuk menyampaikan pesan politik kepada pihak lain. Namun, Komunikasi politik bisa dianggap sebagai kegiatan yang memiliki sifat ilmiah dan bersifat politik dalam kerangka sistem politik.

9. Astrid S Soesanto

Astrid berpendapat bahwa komunikasi politik adalah cara untuk mencapai pengaruh yang besar sehingga masalah yang dibahas dalam komunikasi politik dapat memperoleh dukungan dari seluruh masyarakat melalui persetujuan lembaga politik.

10. Dan Nimmo

Komunikasi politik mengontrol perilaku manusia dalam situasi konflik dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Aktivis politik, konsultan, politisi, profesional pemasaran, dan juru bicara melakukan banyak hal. Pesan politik, media politik, audiens umum, persuasi, dan hasil komunikasi politik semua termasuk dalam lingkupnya. Ini sejalan dengan pendapat sepuluh pakar komunikasi politik, yang berpendapat bahwa komunikasi politik mencakup aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan pesan politik serta konsekuensi yang ditimbulkannya. Komunikasi politik terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama mencakup komunikasi dan kegiatan politik yang dilakukan oleh pelaku politik; yang kedua mencakup kegiatan ilmiah dan politik yang terkait.

Susanto berpendapat bahwa komunikasi politik adalah jenis komunikasi yang dimaksudkan untuk membuat seluruh warga menyadari masalah melalui sanksi yang dibuat oleh lembaga politik. Sementara itu, Nimmo mengatakan bahwa istilah politik hanya digunakan dalam konteks komunikasi politik untuk menggambarkan kegiatan bersama orang-orang yang mengatur tindakan mereka dalam konflik sosial.

Menurut McQuail dalam Swanson 1990, kemonikasi politik adalah studi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan

melibatkan studi tentang hubungan antara proses politik dan komunikasi. Ini adalah tempat di mana berbagai teori, pendekatan, agenda, dan konsep bersaing untuk mengubah identitasnya. Akibatnya, komunikasi yang membahas politik kadang-kadang didefinisikan sebagai penelitian tentang elemen-elemen komunikasi publik yang terkait dengan politik. dan sering dikaitkan dengan komunikasi kampanye pemilu, juga disebut sebagai kampanye campaign, karena mencakup elemen seperti penggunaan media masa sebagai alat kampanye, debat antar kandidat, dan persuasi pemilih.

Luciana Pye mengatakan bahwa komunikasi dan politik atau pemerintahan sangat terkait dan berbeda karena keduanya berada dalam domain politik dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting di sana. Glonor, misalnya, mengingatkan bahwa politik tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi dan kerja sama. Pye berpendapat bahwa politik tidak akan relevan tanpa adanya jaringan juga dikenal sebagai komunikasi yang dapat memperluas dan memperluas pilihan individu.

Menurut Lasswell, berikut adalah beberapa definisi linier dari komunikasi politik:

1. Transmisi informasi dalam mengejar kekuasaan Sunshine Hilligus (secara luas mencakup komunikasi verbal, nonverbal, perilaku, dll.)
2. Transmisi informasi apapun tentang persaingan sumber daya (*Bruce Hardy*).
3. Produksi, transmisi, dan efek informasi pada politik, pendapat publik, dan kebijaksanaan publik. (*Bob Lichter*).

Menurut definisi sistematis dari komunikasi politik (lihat Alfian, 1991, Wahyuni 2007), komunikasi politik adalah sebuah sistem yang konsisten, teratur, dan dapat diprediksi. Misalnya, ini termasuk:

1. Pertukaran informasi tentang pelaksaan kekuasaan (*Ken Goldstein*);
2. Interaksi antar warga negara dan media mengenai topik-topik yang berkaitan dengan politik (*Talia Stroud*); dan
3. Pertukaran pesan dan gagasan, baik verbal maupun visual, secara langsung atau melalui media. (*Linda Sanders*)

1.5 Distorsi Komunikasi Politik

Definisi distorsi komunikasi adalah ketika informasi, konsep, dan isi pesan berubah antara komunikator dan komunikan. Empat distorsi yang terkait terjadi selama proses komunikasi politik. Ini adalah penjelasannya.

1. Distorsi sebagai ideologi

Terbagi menjadi dua jenis distorsi ideologis. Yang pertama menganggap kegiatan politik sebagai monopoli atau hak istimewa sekelompok orang. Yang kedua menganggap kegiatan politik hanya melibatkan sistem elit tanpa mempertimbangkan keinginan rakyat.

2. Distorsi sebagai sebuah topeng

Ben Anderson menggunakan istilah "distorsi sebagai topeng" untuk mendefinisikan komunikasi politik sebagai menampilkan perbedaan antara maksud dan kenyataan.

3. Distorsi sebagai bentuk representasi

Distorsi juga dapat muncul dalam komunikasi politik dalam bentuk representasi, yang merujuk pada menyajikan sesuatu dengan cara yang berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi.

4. Distorsi sebagai proyek lupa

Sebagai sarana yang dapat dimanipulasi, komunikasi politik dapat mengalami distorsi lupa, yang berarti bahwa lupa tersebut diciptakan untuk semua orang, bukan hanya beberapa individu tertentu.

1.6 Model Komunikasi Politik

Berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa model komunikasi politik yang harus diketahui masyarakat:

1. Model Aristoteles

Aristoteles' model komunikasi politik adalah salah satu model komunikasi klasik dalam ilmu komunikasi. Model klasik ini lebih berfokus pada pidato, terutama yang berdampak pada orang lain. Oleh karena itu, model ini dikenal sebagai model retorikal atau retorika, dan pendekatan ini sering digunakan untuk menggambarkan komunikasi politik di era modern. Pembicara atau orator,

pesan atau isi pesan, dan pendengar atau audiens adalah tiga komponen utama model komunikasi politik Aristoteles. Terlepas dari fakta bahwa ini adalah model pertama dalam komunikasi politik, model ini memiliki kelemahan karena menganggap komunikasi sebagai fenomena yang statis dan terbatas pada upaya untuk meyakinkan pendengar untuk menerima perspektif pembicara. Meskipun model Aristoteles tidak memperhitungkan bagaimana komunikasi non-verbal memengaruhi orang lain, peneliti lain memilih menggunakan model komunikasi yang lebih modern.

2. Model Komunikasi Politik Harold Lasswell

Dalam model komunikasi politik Lasswell mengatakan bahwa komunikasi adalah ekspresi verbal yang terdiri dari lima komponen: identitas si pembicara, topik yang dibicarakan, saluran yang digunakan, penerima pesan, dan hasil yang diharapkan dari komunikasi.

Komunikasi melakukan tiga fungsi utama, menurut Lasswell: mengawasi lingkungan, menghubungkan berbagai bagian masyarakat yang merespons lingkungan, dan menyampaikan warisan sosial dari generasi ke generasi. Menurutnya, tiga kelompok spesialis komunikasi politik menangani tugas-tugas tersebut. Diplomat dan pemimpin politik termasuk dalam kelompok pengawas lingkungan.

Lasswell menguraikan bahwa komunikasi politik dianggap sebagai usaha persuasi karena pihak yang melakukan komunikasi selalu berusaha memengaruhi penerima pesan. Dalam situasi seperti ini, cara komunikasi politik menyampaikan pesan dapat berdampak baik atau buruk, dan hasilnya juga bergantung pada seberapa baik pemberi pesan menyampaikan pesan.

3. Model Komunikasi Politik Gudykunst dan Kim

Dalam model ketiga komunikasi politik, setiap orang dapat berbicara, terlepas dari latar belakang budayanya. Secara esensial, setiap orang dapat berbicara, tetapi orang-orang yang terlibat dalam komunikasi politik tidak memiliki kesamaan sosiobudaya, psikobudaya, atau budaya.

4. Model Komunikasi Politik Interaksional

Model komunikasi politik interaksional bersifat kualitatif, tidak sistemik, dan tidak linear. Komunikasi politik mencakup proses pembentukan makna atau interpretasi pesan oleh peserta komunikasi serta respons atau perilaku mereka.

Beberapa konsep utama yang digunakan dalam model komunikasi politik interaksional termasuk diri (*self*), diri yang lain (*other*), makna, simbol, tindakan, dan penafsiran. Menurut model ini, simbol merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, dan mereka diharapkan berperilaku aktif, reflektif, kreatif, dan sulit diprediksi.

Peran manusia dalam model komunikasi politik internasional lebih dinamis daripada prosesnya. Konsep bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bergerak ditolak oleh model ini. Model ini juga menempatkan komunikator setara dengan komunikator lainnya. Oleh karena itu, interaksi yang bernilai demokratis terjadi dalam kerangka komunikasi saling memberi dan menerima.

1.7 Komponen dalam Komunikasi Politik

Komunikasi politik, seperti halnya dalam bentuk komunikasi lainnya, memerlukan unsur-unsur tertentu agar dapat beroperasi secara efektif dan pesan dapat diterima oleh lawan bicara.

1. Komunikator

Komunikasi politik termasuk tidak hanya penyedia informasi politik tetapi juga orang atau entitas yang menyampaikan pesan politik. Pelaku komunikasi ini termasuk politisi, pemerintah, lembaga, aktivis, LSM, dan pihak lain.

2. Pesan

Dalam komunikasi politik, pesan mencakup berbagai informasi seperti gagasan, ide, dukungan, budaya, dan nilai-nilai.

3. Media

Komunikator menyampaikan pesan politik kepada komunikan melalui media politik, yang tidak terlalu berbeda dengan media komunikasi umumnya. Komunikasi politik dapat memanfaatkan berbagai jenis media, termasuk media konvensional dan media digital, yang sekarang juga menjadi alat komunikasi politik.

4. Komunikan

Komunikator dan komunikan sangat penting dalam komunikasi politik. Komunikan adalah orang yang menerima pesan politik. Komunikan dapat mencakup publik umum atau bahkan pemerintah.

5. Efek atau konsekuensi

Beberapa pakar politik berpendapat bahwa komunikasi politik adalah proses yang memiliki dampak. Efek komunikasi politik dapat mencakup dukungan, pengetahuan, dan persuasi yang mendorong orang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Salah satu hasil positif komunikasi politik adalah mendorong pendukung untuk mendukung aktor politik.

6. Hambatan

Komunikasi politik bisa mengalami distorsi. Hambatan dalam komunikasi politik, mirip dengan komunikasi pada umumnya, dapat berasal dari aspek teknis, sosial budaya, atau semantik.

1.8 Fungsi Komunikasi Politik

Berikut ini adalah penjelasan fungsi komunikatif politik dalam sistem politik:

1. Menyampaikan informasi politik: Tugas utama komunikasi politik adalah menyampaikan informasi politik, yang mencakup banyak aspek, baik yang luas maupun terbatas.
2. Mempertahankan nilai: Komunikasi politik adalah cara untuk mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada.
3. Sosialisasi politik: Fungsi ini dianggap sebagai inti dari sosialisasi masyarakat, dan komunikasi politik berperan dalam proses tersebut.

4. Mendorong Perubahan Iklim: Komunikasi politik memiliki kemampuan untuk persuasif, yang dapat mendorong perubahan iklim politik.
5. Kontrol sosial: Komunikasi politik mencakup hak jawab dan hak berpendapat setiap anggota masyarakat, yang menyumbang kontrol sosial.
6. Memberi Motivasi: Komunikasi politik dapat membantu mendorong pihak atau golongan yang membutuhkan dukungan.
7. Hiburan: Komunikasi politik juga memiliki tujuan untuk menghibur, seperti dalam debat politik atau seni orasi.
8. Meningkatkan partisipasi politik: Komunikasi politik membantu masyarakat lebih terlibat dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Heywood. (2014). *Politik* (Kusmini P Rianayati, Ed.; Edisi cetakan 1). Pustaka Pelajar.
- Dr.H.Zaenal Mukarom, M. S. (2016). *Komunikasi Politik* (1st ed.). CV PUSTAKA SETIA.
- Maswadi Rauf. (1993). *Indonesia dan Komunikasi Politik* (Rauf Maswadi & Nasrun Mappa, Eds.; Jilid 1). Gramedia Pustaka Utama.
- McQUAIL Denis. (1990). *Teori Komunikasi Massa* (Edisi 6 Buku 1). Erlangga.
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cetakan 1). Gramedia Pustaka Utama.

BAB 2

PERAN MEDIA MASSA DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Oleh Muhammad Yusuf AR.

2.1 Pendahuluan

Media massa telah lama menjadi aktor utama dalam komunikasi politik, termasuk di era modern seperti saat ini ketika distribusi pesan-pesan politik berlangsung sangat cepat. Penggunaan medianya pun berbagai macam platform, baik media tradisional seperti buku, koran, televisi, dan radio. Maupun berupa media baru seperti internet dan media sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara politikus dan masyarakat umum, serta membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas.

Kecepatan distribusi tersebut mampu membentuk opini publik, memengaruhi perilaku politik seluruh stakeholder politik. Salah satu keunggulan media massa adalah dapat menjangkau khalayak luas dan beragam. Selain itu mampu menyajikan informasi politik secara komprehensif dan mendalam. Peran media massa tidak hanya sebatas menyebarkan informasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam membingkai isu dan agenda publik, sehingga dapat menentukan isu –di antara banyak isu-- yang dianggap penting dan layak diberitakan, serta bagaimana isu tersebut dibingkai dan diinterpretasikan oleh publik.

Fungsi klasik media massa adalah memberikan wacana yang dimaksudkan membentuk opini publik. Melalui berbagai informasi, komentar, editorial dan artikel yang dimuat di surat kabar, serta wawancara di media televisi dan radio, dapat memberikan berbagai penafsiran dan pendapat pembaca dan pemirsa. Melalui kemampuan *agenda setting*-nya media massa dapat menarik perhatian khalayaknya untuk menyatakan setuju

atau tidak setuju dengan gagasan yang disebarkan media massa tersebut. Dengan demikian, maka media massa tidak hanya dapat dianggap sebagai industri hiburan dan informasi, melainkan juga sebagai sarana pembentuk opini publik. Mengingat kapasitas media dalam membentuk opini di tengah masyarakat, maka aktivitas pemimpin negara, politikus, dan pembuat kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari peran media massa. Sebaran informasi dan gagasan baru dari media massa dapat memengaruhi para pengambil keputusan. (Cangara, 2009)

Beberapa di antara aktivitas komunikasi politik yang dapat dilakukan melalui media massa adalah sosialisasi ideologi dan platform politik partai politik dan kandidat kepada para pemilih. Sebagai alat yang sangat efektif untuk kampanye politik, dengan mempromosikan kandidat, termasuk jika ingin menyerang lawan politik. Termasuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah, sebagai anjing penjaga (*watchdog*) dengan mengeritik kebijakan pemerintah dan mengungkap praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Hanya saja, bukan berarti media tidak menghadapi tantangan maupun kritik, salah satu di antaranya adalah kekhawatiran terhadap munculnya potensi bias dan disinformasi yang dibuatnya sendiri. Terutama jika dikaitkan dengan manipulasi informasi dari aktor politik dan pihak tertentu untuk memanipulasi opini publik, termasuk kuatnya godaan tidak bersikap independen dan bertindak profesional karena desakan politik maupun finansial. Hal ini dapat memengaruhi ruang redaksi sehingga mendistorsi objektivitas dan menghambat lahirnya praktik jurnalisme berkualitas.

Sebuah penelitian di Hong Kong menunjukkan bahwa penggunaan media berita konvensional dan media online sebagai media alternatif, dapat memengaruhi partisipasi politik dengan cara yang berbeda. Media berita tradisional berperan sebagai fasilitator efektif untuk meningkatkan partisipasi politik institusional dan non-institusional, sedangkan media online terutama berfungsi sebagai penguat ketidakpuasan politik untuk mendorong partisipasi politik non-institusional masyarakat, seperti melakukan aksi protes. (Xia & Shen, 2018)

Dengan demikian, maka peran media massa tidak terbantahkan memberi pengaruh terhadap partisipasi politik, sebagai bagian penting dari komunikasi politik. Pemahaman yang tepat mengenai peran media dalam komunikasi politik, dapat melahirkan sebuah proses komunikasi politik yang lebih kritis dan cerdas; paham bagaimana informasi politik disebarluaskan dan bagaimana opini publik terbentuk.

2.2 Media Massa dan Karakteristiknya

Interaksi manusia pada kehidupan modern saat ini tidak dapat terpisahkan dari kehadiran media massa. Komunikasi manusia tidak hanya berlangsung begitu cepat melalui berbagai platform komunikasi, tetapi juga sangat intensif dan massif kepada banyak lapisan masyarakat. Dengan demikian manusia butuh bentuk komunikasi massa untuk menunjang kehidupannya sehari-hari.

Komunikasi massa meniscayakan adanya media sebagai wahana penyampaian pesan. Media itulah yang dikenal sebagai media massa atau dikenal pula dengan istilah pers (*press*). Kata media berasal dari serapan bahasa Latin, “medium”, dimaknai sebagai tengah, pengantar atau perantara. Kata ini kemudian terserap ke dalam bahasa Inggris menjadi “media”, lalu diserap ke bahasa Indonesia dengan istilah yang sama. Sedangkan massa berarti “kelompok” atau “kumpulan”. Dengan demikian, media massa memainkan peran perantara yang memungkinkan jalinan hubungan satu sama lain antara pengirim pesan dengan penerima.

Media massa yang dalam penyebutan sehari-hari populer disebut “media”, menjembatani pesan komunikator kepada khalayak (komunikan). Media massa populer di antaranya surat kabar, majalah, tabloid, jurnal, newsletter, maupun buku. Jenis ini dikenal sebagai media cetak. Sementara televisi, radio, juga film (*movie*) tergolong media elektronik. Berbeda dengan cetak dan elektronik, media online membutuhkan jaringan koneksi internet berbasis komputer untuk mengirim dan menerima informasi.

2.2.1 Media Cetak

Karakteristik yang sangat melekat dari media cetak adalah medianya berupa cetakan dalam lembaran-lembaran. Biasanya berisi teks dan visual foto, karikatur, dan grafis. Meski saat ini media cetak perlahan ditinggalkan, selama berabad-abad lampau media cetak menjadi satu-satunya alat komunikasi massa yang efektif berperan menyampaikan informasi kepada publik dan mempertemukan banyak kepentingan di tengah masyarakat. Itulah sebabnya, media cetak –dalam hal ini surat kabar-- diakui paling banyak pengaruhnya dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Pada umumnya, media cetak surat kabar terbit secara teratur menemui pembacanya setiap hari, meski ada juga yang periodesasi terbitnya sekali sepekan. Majalah yang ukurannya lebih kecil dari surat kabar, biasanya terbit sekali sepekan. Namun demikian, media cetak yang punya relevansi pembahasan dengan komunikasi politik hanyalah surat kabar, karena sejarah mencatat peran surat kabar di sangat besar atas terwujudnya perubahan sosial dan politik di seluruh dunia.

Surat kabar punya ciri khas, yakni: (1) berisi karya jurnalistik berupa laporan peristiwa yang terjadi setiap hari di tengah masyarakat, (2) isinya variatif, meliputi berbagai ragam kehidupan manusia, (3) isinya bersifat umum, semua kalangan dapat membacanya, (4) informasinya actual, baru terjadi dan dibutuhkan oleh publik. (Arifin, 2016)

2.2.2 Media Elektronik

Media massa elektronik paling awal bukanlah radio atau televisi. Menurut Anwar Arifin (2016), film adalah media massa kedua setelah surat kabar. Film-lah yang menjadi pioner lahirnya media elektronik pada akhir abad ke-18 (1895) dan mencapai puncak keemasannya antara perang dunia I dan perang dunia II.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1992 sebagai penyempurnaan UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, merumuskan definisi film sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam

pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya; maka film setidaknya mengandung tiga substansi. *Pertama*, film sebagai *karya seni budaya* yang dibuat berdasarkan teknik sinematografi dan dapat dipertunjukkan dengan suara atau tanpa suara. *Kedua*, film sebagai pranata sosial yang diproduksi oleh orang-orang profesional terorganisasi. Selain itu film memiliki seperangkat nilai atau gagasan, visi, dan misi yang diserap dari masyarakat. *Ketiga*, film adalah media komunikasi massa karena fungsinya yang menyalurkan nilai dan gagasan kepada masyarakat dengan daya pengaruh yang besar. (Arifin, 2016)

Menurut Arifin, (2016) radio adalah media massa elektronik yang lahir setelah film. Radio berada di urutan ketiga keberadaan media massa setelah surat kabar dan film. Radio mulai dikenal awal abad 20, yakni pada 1901. Media massa ini berbasis audio yang pesan-pesannya hanya dapat diterima melalui indera dengar. Namun, beberapa tahun terakhir, berkat kecanggihan teknologi internet, radio berubah dari media auditif menjadi audio visual. Hal ini terjadi karena siaran radio dapat melakukan siaran *live streaming* melalui jaringan internet.

Di Indonesia, eksistensi siaran radio sangat berjasa bagi perjuangan kemerdekaan. Peristiwa pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh dwitunggal Soekarno-Hatta bisa sampai ke seluruh dunia adalah berkat aksi nekat Moehammad Jusuf Ronodipuro, salah seorang tokoh dari kalangan pemuda yang pertama kali menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio. Ia membajak Radio Hoso Kyoku milik pemerintah militer Jepang, untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Radio Hoso Kyoku di kemudian hari menjadi RRI. Jusuf Ronodipuro merupakan salah seorang pendirinya pada 11 September 1945. (Rifki & Jaiddin, 2023)

Pasca-kemerdekaan, radio berangsur-angsur memasuki wilayah komersial yang lebih mengutamakan unsur hiburan berupa pemutaran lagu dengan berbagai genre musik. Sehingga

sampai saat ini radio identik sebagai siaran hiburan, meski sama sekali tidak menghilangkan program informasi berupa berita. Ada pula radio yang memang lebih fokus melaksanakan liputan jurnalistik, sehingga radionya disebut sebagai radio berita dan informasi. Kerja jurnalistik tersebut dapat dikategorikan sebagai kerja media komunikasi massa sebagaimana aktivitas jurnalistik surat kabar dan televisi.

Partisipasi pendengar radio lebih rendah dibanding partisipasi pembaca surat kabar dalam mengonsumsi informasi, salah satu sebab karena pendengar (khalayak) menuntut intensifikasi indra pendengaran saja dengan menggunakan imajinasinya sendiri untuk memahami peristiwa yang sesungguhnya, selain karena pesannya cepat berlalu dan relatif tanpa pengulangan.

Media elektronik televisi menyusul radio pada tahun 1920-an. Inilah media massa keempat yang berkempang pesat pada Perang Dunia II. Jika film adalah media visual pertama dan radio sebagai media audio, maka televisi merupakan gabungan dari keduanya; dapat dipandangdengar, sehingga memiliki daya persuasi yang sangat kuat. Banyak politikus hingga saat ini memanfaatkan televisi sebagai saluran komunikasi politik dengan produk liputan siaran berita maupun iklan spot.

Irene Silvia mengemukakan beberapa karakteristik televisi: (1) audiovisual (audio-visual atau dengar-lihat); gambarnya bergerak, (2) berpikir dalam gambar; komunikator harus mampu menyampaikan ide/gagasan melalui visualisasi (kata-kata), (3) mampu mengatasi audiens yang buta huruf dan tuna rungu, (4) operasionalnya lebih kompleks, (5) siarannya oleh waktu, (6) metode penyajiannya variatif; program siarannya bermacam-macam, interaktif. (Silvia et al., 2021)

2.2.3 Media Online

Jenis media ini disebut juga sebagai media siber (*cyber media*), dimaknai sebagai segala bentuk media yang menggunakan internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers. Konten media online sangat beragam, berupa artikel, berita, gambar,

komentar, suara, maupun video. Bisa juga berupa blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan berbagai produk lain.

Penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) akhir Januari 2024, mencapai angka 79,5 persen atau sekira 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Penetrasi ini terus mengalami peningkatan secara konsisten sejak 2018 yang hanya pada kisaran 64,8%. Kemudian terus meningkat menjadi 73,7 persen pada 2020, sementara pada 2022 mencapai 77,01 persen lalu naik lagi ke angka 78,19 persen pada 2023.

Maraknya penggunaan media online sebagai sarana komunikasi massa dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) aksesnya mudah, (2) murah biayanya, (3) aksesnya cepat, (4) memiliki mobilitas tinggi, dan (5) ketersediaan layanannya sangat mudah. Dengan demikian, banyak orang mengalihkan ke media online sebagai sumber informasi utama, baik untuk konsumsi personal maupun sarana hiburan.

Kemajuan teknologi internet yang menjadi basis utama media online, mengakibatkan terjadinya transformasi pola penggunaan media. Komunikasi tidak lagi sekadar sebagai penerima, tetapi menjadi lebih aktif dan ikut memainkan peran sebagai komunikator yang mampu menghasilkan informasi dan menyiarkannya melalui media internet, baik berupa blog, maupun website. Itulah salah satu faktor pendorong mengapa internet kini telah menjadi bagian penting dan utama dalam lalu lintas informasi di seluruh dunia. Dengan kecepatannya, seorang pengguna internet dapat menelusuri suatu informasi dari satu sumber ke sumber lainnya dalam waktu singkat dan mudah.

2.2.4 Media Sosial

Media sosial (medsos) jauh melampaui keunggulan media konvensional, terutama dalam hal kecepatan informasi, keunggulan platform, fleksibilitas akses, interaktivitas maupun variasi konten. Medsos dengan demikian mampu menghilangkan beberapa hambatan yang selama ini melekat

pada media konvensional, seperti terbatasnya distribusi dan kecepatan sebaran informasi. Demikian pula dalam konteks komunikasi politik, medsos telah menciptakan ruang baru, terutama bagi siapa pun yang memiliki akses internet untuk dapat mengekspresikan pendapatnya serta ikut serta dalam perdebatan politik.

Istilah media sosial merupakan istilah yang disematkan secara umum pada cakupan seperti blog dan platform blogging, jejaring sosial seperti Facebook, situs dan aplikasi berbagi macam konten, termasuk YouTube dan Instagram, dan forum komunitas. Kendati cakupan definisinya sebagai bentuk komunikasi melalui internet, tapi bukan berarti semuanya hanya tentang situs web. Media sosial juga mencakup aplikasi seluler, yang memiliki profil dan tampilan situs web, tetapi fungsi utamanya bukan untuk berbagi dan mengakses konten. Bahkan platform yang awalnya tidak tersedia untuk web seluler, seperti Facebook dan Twitter, telah menunjukkan betapa pentingnya teknologi seluler untuk pengalaman pengguna, terutama dalam hal integrasi dan koneksi ke layanan lain. Ini memungkinkan pengguna dapat berbagi update informasi dan konten kapan dan di mana saja.(Highfield, 2017).

Laporan yang dirilis We Are Social pada Januari 2024, mencatat total pengguna media sosial di Indonesia mencapai separuh dari total penduduk sebesar 139 juta orang, atau setara dengan 49,9 persen. Secara berturut-turut pengguna tertinggi media sosial adalah WhatsApp, digunakan oleh 90,9 persen populasi, Instagram 85,3 persen, sementara Facebook lebih rendah, hanya 81,6 persen, dan pengguna TikTok mencapai 73,5 persen populasi. (Social, 2024) Potensi yang besar ini, tentu akan terus membesar seiring perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk, dan standar hidup masyarakat Indonesia yang kian baik. Sehingga menjadi salah satu media komunikasi politik baru dan menggiurkan, karena mampu memengaruhi penggunanya.

2.3 Memahami Komunikasi Politik

Konteks komunikasi politik ada pada proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan yang terjadi di dalam sistem politik. Interaksinya melibatkan beberapa pihak, di antaranya: aktor politik, partai politik, media massa, dan masyarakat umum. Komunikasi politik bertujuan memengaruhi opini, sikap, serta perilaku politik, sehingga sasaran dapat mengubah pandangan atau pilihan politiknya, termasuk siap terlibat dalam mobilisasi dukungan.

Beberapa teori turut berjasa dalam perjalanan lahirnya komunikasi politik, di antaranya adalah Harold Lasswell. Pakar ilmu politik itu mengusulkan model komunikasi politik dalam bentuk pertanyaan "siapa, mengatakan apa, kepada siapa, dalam saluran apa, dengan efek apa". Pertanyaan mendasar ini dikenal sebagai Model Lasswell. Inilah temuan model komunikasi politik pertama dalam memahami hubungan antara media dan politik, kemudian menginspirasi para ahli dalam menemukan teori-teori komunikasi politik baru.

Hubungan timbal balik dalam kajian media dan politik, makin menguatkan eksistensi komunikasi politik terus berkembang. Misalnya, Maxwell McCombs dan Donald Shaw, tokoh di balik teori agenda setting, yang menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana media membentuk agenda publik. Lalu, Ernest B. Griffin memberi kontribusi penting dengan teori framing, sebuah cara memahami pengaruh media massa dalam politik, terutama dalam konteks framings dan framing effects. Penguasaan atas pemikiran tiga tokoh tersebut, sudah dianggap memadai untuk bisa memahami seperti apa komunikasi politik.

2.4 Media sebagai Saluran Komunikasi Politik

Lazarsfeld dan rekan-rekannya pada 1940 dan 1948, memantik begitu banyak perhatian terhadap komunikasi politik. Karyanya yang fokus mengulas tentang bagaimana warga menentukan pilihan suara mereka pada pemilihan presiden AS, rupanya menimbulkan dampak mendalam terhadap studi komunikasi politik. Dua elemen utama mencuat, yakni adanya

model efek-terbatas dan hubungan antara media massa dan komunikasi antarpribadi. *Pertama*, bahwa media massa hanya punya dampak kecil terhadap opini publik. *Kedua*, bahwa informasi politik di media terutama dikonsumsi oleh para pemimpin opini, bertindak sebagai perantara antara media dan masyarakat luas. Dengan demikian, dampak media terhitung relatif kecil dan sebagian besar tidak langsung, dengan efek langsung komunikasi di dalam konteks politik yang berakar kuat pada komunikasi antarpribadi. (Charles R. Berger, 2015)

Begitu pula sejak munculnya ilmu politik sebagai suatu disiplin penelitian, perdebatan tentang pengaruh media massa terhadap perilaku politik dan institusi politik seakan tidak pernah berhenti. Teori pun banyak bermunculan, tetapi relatif saling bertentangan sekaligus saling melengkapi. Semua itu muncul untuk menjelaskan bagaimana media sebagai pilar keempat demokrasi melaporkan, menafsirkan, menganalisis, dan mengonteks-tualisasikan informasi tentang politik, pemerintahan maupun masyarakat. Kian canggihnya teknologi komunikasi, jaringan komputer, internet, mendorong industri media massa maju pesat. Begitu pula penggunaan profesional komunikasi yang terampil dalam pemasaran dan manipulasi pesan, telah memicu pertimbangan ulang atas peran dan fungsi media berita dari media massa (Borges, 2015).

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah lanskap media sebagai saluran komunikasi politik. Platform-platform ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses politik, namun juga membawa risiko penyebaran informasi palsu dan polarisasi opini. Muncul kekhawatiran yang semakin besar mengenai peran media sosial dalam menyebarkan informasi yang salah, dan secara luas digambarkan sebagai berita palsu (*fake news*). (Domenico et al., 2021).

Di era demokrasi modern, komunikasi politik telah menjadi pilar fundamental dalam membangun masyarakat yang partisipatif dan akuntabel. Komunikasi tersebut berlangsung melelaui media dari berbagai platform yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, gagasan, dan aspirasi secara

timbang balik. Bagaimana komunikasi politik memengaruhi opini publik, dan bagaimana opini tersebut dapat diatur dan dipertanggungjawabkan agar lebih mencerminkan wacana politik di media. (Daud, 2021)

Media dalam berbagai platform, termasuk media konvensional (surat kabar, televisi, dan radio) tetap memainkan peran penting dalam memengaruhi opini publik. Hanya saja, media digital telah menjadi alat komunikasi politik yang luar biasa dan berhasil mengambil alih begitu banyak kemampuan pengaruh, khususnya di kalangan generasi muda. Tetapi kekhawatiran mengenai penyebaran informasi hoaks, dan dampak algoritma media sosial, ikut menghambat wacana politik yang terbuka dan objektif.

Sebagai saluran komunikasi politik, internet dan media sosial memiliki sejumlah kelebihan, antara lain: (1) Kemampuan untuk menembus batas wilayah, ruang dan waktu; (2) Memperluas akses memperoleh informasi global; (3) Meningkatkan kemampuan untuk berserikat secara bebas; (4) Mengancam tatanan yang telah mapan, seperti pemerintahan otokrasi; serta (5) memiliki kecepatan perkembangan dan penyebaran yang sulit diatasi. (Cangara, 2016).

Peran penting yang dapat dimainkan media, antara lain:

1. Sebagai alat distribusi informasi. Media bertindak sebagai penyampai informasi dari pemerintah atau politikus, dan institusi politik kepada publik. Berita tentang kebijakan pemerintah, peristiwa politik yang melibatkan elite maupun warga biasa, serta perkembangan terbaru yang memengaruhi kehidupan masyarakat luas, disampaikan warga melalui berbagai platform, akan membantu warga negara mengetahui dan memahami apa yang terjadi di dunia politik.
2. Membentuk Opini Publik. Melalui agenda setting, media mampu membentuk opini publik dengan perhatian yang lebih pada sebuah isu tertentu. Publik akan mengikuti dan cenderung membicarakan isu yang digiring oleh media.
3. Kontrol Sosial. Fungsi *watchdog* sebagai pengawas tindak-tanduk penguasa sudah lama melekat pada media. Media dapat menjalankan peran sebagai investigator atas kebijakan

dan langkah pemerintahan, mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, ketidakadilan, kolusi, dan nepotisme. Media memastikan bahwa penguasa bertanggung jawab atas tindakan mereka.

4. Forum Pendapat. Media menyiapkan berbagai forum terbuka yang dapat dimanfaatkan publik untuk berpendapat dan berdiskusi. Misalnya, menyiapkan kolom opini, surat pembaca, talkshow di radio dan televisi.
5. Pendidikan Politik Warga. Selain sebagai media informasi, media sesungguhnya memainkan peran sebagai lembaga pendidikan juga. Mendidik warga negara dengan informasi politik yang bermutu, sehingga literasi politiknya meningkat.
6. Kampanye dan Mobilisasi. Pemerintah maupun politikus memanfaatkan media untuk menggalang dukungan. Mengampanyekan program melalui iklan dan advertorial, rilis, dan sebagainya. Meski begitu, politikus juga harus pandai memilih dan memilih media sesuai sasaran yang akan dituju.
7. Representasi Publik. Bukan hanya sebagai produsen dan distributor informasi, media merupakan perwakilan kepentingan masyarakat dengan cara mengangkat isu-isu tertentu. Melalui media, pemerintah maupun elit politik dapat mengetahui apa yang menjadi perhatian dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, maka peran media massa dalam komunikasi politik sesungguhnya merupakan kunci terciptanya demokrasi yang kuat. Pemerintah, politikus, partai politik, anggota parlemen, dan siapa saja yang terkait hajat hidup orang banyak merupakan pihak-pihak yang menjadi perhatian dan punya hubungan timbal-balik dengan media.

2.5 Tren Penggunaan Media dalam Komunikasi Politik

Masa kejayaan media konvensional telah lewat. Kita saat ini sedang menikmati kemajuan teknologi yang didominasi internet dan media sosial. Para politikus, aktivis partai, pemerintah, konsultan politik, para praktisi media, dan masyarakat umum harus mengikuti tren ini. Beberapa di antaranya adalah:

1. **Media Sosial.** Saat ini, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok menjadi platform utama bagi politikus dalam menjangkau pemilih, membangun citra, dan menyebarkan pesan politiknya. Medsos memungkinkan interaksi langsung dengan pemilih, membangun hubungan personal, dan merespon aspirasi mereka secara real-time. Salah satu kelebihanannya adalah konten visual seperti gambar, video, teks, dan infografis menjadi daya persuasif yang tidak dimiliki platform media lain.
2. **Influencer/Konten Kreator.** Umumnya, kalangan ini berasal dari figur terkenal, meski ada pula yang bermula dari hobi sebagai pembuat konten. Karena punya pengikut besar, mereka dilirik aktivis partai, politikus, maupun pemerintah untuk dilibatkan dalam kampanye politik. Pengikut yang banyak memungkinkan *influencer* memberi pengaruh besar kepada pengikutnya, melalui konten-konten yang dibuatnya.
3. **Podcast dan Streaming.** Podcast memungkinkan politikus dan partai politik menyampaikan pesan mereka secara mendalam dan rinci. Selain itu, podcast menawarkan fleksibilitas tinggi kepada pendengarnya, dapat diakses kapan dan di mana saja. Keunggulan ini memungkinkan politikus menjangkau audiens yang mungkin tidak bisa mengikuti berita secara langsung. Podcast kerap digunakan untuk wawancara, diskusi panel, dan debat.
4. **Buzzer Politik.** Boleh disebut sebagai pengendali opini di dunia maya. Mereka adalah individu atau tim khusus yang biasanya mendapat bayaran untuk memengaruhi opini politik publik dengan menyebarkan informasi (positif atau

negatif), tentang sebuah isu, kandidat, atau partai politik tertentu melalui akun media sosial. Selain membangun citra positif kandidat, buzzer juga menyerang lawan politik, bahkan menyebarkan berita bohong (hoax) atau isu miring untuk menjatuhkan kredibilitas lawan politik.

5. Media Konvensional. Jangan dikira media konvensional televisi, radio, dan surat kabar sudah tak berdaya di tengah kedigdayaan media berbasis konektivitas internet seperti media online dan media sosial. Sebab, mereka mengambil langkah adaptasi dengan menyediakan konten berita dan program dalam format digital. Distribusi kontennya tidak lagi mengandalkan kemampuan media itu sendiri, melainkan ikut menggunakan platform media sosial untuk promosi program dan menarik para penonton.

2.6 Penutup

Demokrasi akan berjalan dengan baik bila media dapat menjalankan fungsinya dengan benar, antara lain sebagai tempat menyosialisaikan ideologi dan platform partai politik serta kandidatnya kepada pemilih secara serentak. Selain sebagai pendorong partisipasi politik masyarakat, media menjadi ruang implementasi akuntabilitas pemerintah dalam bentuk komunikasi politik yang transparan dan akuntabel, sehingga memungkinkan masyarakat memantau kinerja pemerintah dan bisa menuntut pertanggungjawaban.^^)

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2016). *Media dan Demokrasi Indonesia: Studi Komunikasi Politik*. Pustaka Indonesia.
- Borges, W. (2015). *Mass Media and Politics* (J. D. B. T.-I. E. of the S. & B. S. (Second E. Wright (ed.); pp. 712–718). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.93164-7>
- Cangara, H. (2009). *Komunikasi politik: konsep, teori, dan strategi*. Rajawali Pers. <https://books.google.co.id/books?id=-wANAQAAMAAJ>
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Raja Grafindo Persada.
- Charles R. Berger, M. E. R. dan D. R. R.-E. (2015). *Handbook Ilmu Komunikasi*. Nusa Media.
- Daud, R. S. (2021). The Role of Political Communication in Shaping Public Opinion: A Comparative Analysis of Traditional and Digital Media. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 1(2), 63–69. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v1i2.241>
- Domenico, G. Di, Sit, J., Ishizaka, A., & Nunan, D. (2021). Fake news, social media and marketing: A systematic review. *Journal of Business Research*, 124, 329–341. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.11.037>
- Highfield, T. (2017). *Social Media and Everyday Politics*. Polity Press. <https://books.google.co.id/books?id=cRArDwAAQBAJ>
- Rifki, & Jaiddin, C. (2023). *Jelang Hari Radio 2023, Mengenal Moehammad Joesoef Ronodipoero*. RRI.Co.Id.
- Silvia, I., Perwirawati, E., & Besti Rohana Simbolon. (2021). *Manajemen Media Massa*. Scopindo Media Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=EBQxEAAAQBAJ>
- Social, W. A. (2024). *Digital 2024 Indonesia, The Essential Guide to The Latest Connected Behaviours*. https://wearesocial.com/id/wp-content/uploads/sites/19/2024/02/Digital_2024_Indonesia.pdf

Xia, C., & Shen, F. (2018). Political Participation in Hong Kong: The Roles of News Media and Online Alternative Media. *International Journal of Communication*, 12, 1569–1590.

BAB 3

OPINI PUBLIK

Oleh Alexander Pramono

3.1 Pendahuluan

Opini Publik atau *public opinion* sebagai sebuah fenomena dalam kehidupan sosial dan politik mulai banyak dikenal dan dipakai pada akhir abad ke-18 di Eropa dan Amerika Serikat. Pemakaian istilah itu berkaitan dengan politik dan komunikasi politik ketika Alquin menyerukan, “*vox populi, vox dei*” (suara rakyat adalah suara Tuhan). Hal ini berkaitan dengan berkembangnya gagasan tentang pentingnya kemerdekaan berserikat dan kebebasan menyatakan pendapat di depan umum sebagai salah satu elemen penting dalam membangun demokrasi (Anwar, 2013).

Opini publik adalah pandangan atau sikap kolektif yang dimiliki oleh sekelompok orang mengenai suatu isu atau permasalahan. Opini publik terbentuk melalui berbagai faktor, termasuk pendidikan, pengalaman, dan lingkungan sosial. Pendidikan dapat membentuk opini publik dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu isu. Pengalaman dapat membentuk opini publik dengan memberikan pengalaman langsung tentang suatu hal. Lingkungan sosial dapat membentuk opini publik dengan memberikan pengaruh dari orang-orang di sekitar kita. Opini publik, yang dapat berupa persetujuan, ketidaksetujuan, atau sikap netral terhadap suatu isu, memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik, terutama dalam sistem demokrasi.

Opini publik dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, perilaku masyarakat, dan arah perkembangan suatu bangsa. Dalam demokrasi, opini publik dianggap sebagai suara rakyat yang harus didengarkan oleh pemerintah.

Menurut Noelle Neumann (Morisson, 2014). “*ttitudes or behaviors one must express in public if one is not to isolate oneself; in areas of controversy or change, public opinion are those*

attitudes one can express without running the danger of isolating oneself". Masyarakat dapat memahami opini publik sebagai proses di mana mereka menyampaikan pikiran, perasaan, dan usulan mereka terhadap berbagai isu atau kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Proses ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti diskusi, demonstrasi, pemungutan suara, atau melalui media massa. Opini publik dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang selaras dengan keinginan masyarakat. Namun, opini publik juga dapat menimbulkan konflik dan perselisihan pendapat, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan terhadap suatu isu atau kebijakan.

Opini publik, mengacu pada sikap dan keyakinan kolektif masyarakat mengenai suatu isu atau permasalahan tertentu, memiliki peran penting dalam sejarah perubahan sosial dan politik. Machiavelli, dalam bukunya *Discourses*, menekankan pentingnya bagi para pemimpin untuk mempertimbangkan opini publik dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan isu-isu yang sensitif. Jean-Jacques Rousseau, filsuf abad ke-18, menyebut opini publik sebagai "ratu dunia", melambangkan kekuatannya yang tak tertandingi dalam memengaruhi jalannya pemerintahan dan perubahan sosial. Rousseau meyakini bahwa pemerintah yang efektif harus mengikuti arus opini publik, namun dia juga menyadari adanya hubungan timbal balik di mana kebijakan pemerintah dapat membentuk dan memengaruhi opini publik itu sendiri.

Opini publik, mengacu pada sikap dan keyakinan kolektif masyarakat mengenai suatu isu atau permasalahan tertentu, erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi, yang didefinisikan sebagai hak individu untuk mengungkapkan ide, pendapat, dan keyakinan mereka secara terbuka tanpa rasa takut akan represif. Kebebasan berekspresi memungkinkan individu untuk menyuarakan ide, pendapat, keinginan, keluhan, dan kritik konstruktif mereka, yang kemudian berkontribusi pada pembentukan opini publik. Dengan kata lain, opini publik dapat dilihat sebagai hasil dari kebebasan berekspresi yang memungkinkan individu untuk secara aktif berpartisipasi dalam wacana publik.

3.2 Pengertian Opini Publik

Opini publik adalah kumpulan sikap dan keyakinan yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat terhadap suatu isu atau permasalahan tertentu. Opini publik terbentuk melalui proses pertukaran ide dan diskusi di antara individu dengan beragam perspektif. Opini individu, yang menjadi batu bata penyusun opini publik, muncul berdasarkan persepsi dan pengalaman individu terhadap suatu isu. Opini publik terbentuk ketika sejumlah besar individu memiliki pandangan serupa mengenai suatu isu. Opini publik yang kuat dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik. Contohnya, ketika opini publik terhadap suatu kebijakan kuat, maka pemerintah akan cenderung mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

Menurut Nimmo, opini publik merupakan proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas dicapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan, serta perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. (Iswandi, 2018).

Opini publik adalah kumpulan opini, sikap, dan keyakinan yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat terhadap suatu isu atau permasalahan tertentu. Dalam ilmu komunikasi, opini publik didefinisikan sebagai proses interaksi dan pertukaran informasi yang membentuk sikap, keyakinan, serta menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Opini publik memiliki peran penting dalam mempengaruhi kebijakan publik, memicu gerakan sosial, dan mendorong perubahan sosial. Proses pertukaran informasi ini berlangsung melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa (koran, televisi, radio), media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Instagram*), forum *online*, *blog*, dan interaksi antar individu secara langsung maupun daring (melalui percakapan, diskusi, dan demonstrasi). Opini publik dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan

masyarakat, termasuk kebijakan publik, agenda media, dan perilaku individu.

Melalui proses pertukaran informasi ini, opini publik terbentuk dan berkembang. Opini publik ini dapat memengaruhi sikap individu dan kelompok terhadap berbagai isu, dan bahkan dapat mendorong munculnya isu-isu baru dalam masyarakat. Opini publik dinyatakan secara terbuka melalui berbagai cara, seperti demonstrasi, petisi, pemungutan suara, dan diskusi publik. Media massa juga memainkan peran penting dalam menyampaikan opini publik kepada khalayak yang lebih luas.

Efek opini publik dapat bervariasi, mulai dari memengaruhi kebijakan pemerintah hingga mendorong perubahan sosial. Efek ini tergantung pada berbagai faktor, seperti kekuatan opini publik, tingkat dukungan dari berbagai pihak, dan cara opini publik diungkapkan.

3.2.1 Tahap Pembentukan Opini Publik

Opini publik, mengacu pada sikap dan keyakinan kolektif masyarakat mengenai suatu isu atau permasalahan tertentu, mencerminkan kesatuan pendapat atau pandangan mayoritas masyarakat. Pembentukan opini publik adalah proses yang dinamis dan kompleks, dengan durasi yang bervariasi (cepat, lambat, atau tertunda) tergantung pada berbagai faktor. Beberapa faktor yang memengaruhi proses pembentukan opini publik antara lain ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses, keterlibatan media massa dalam memberitakan isu, tingkat pendidikan masyarakat, dan kepentingan politik yang bermain. Memahami proses pembentukan opini publik penting untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terbentuk dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti kebijakan publik, agenda politik, dan perilaku sosial.

Opini publik bersifat dinamis. Pandangan individu tentang masalah dapat berubah dan berkembang dari waktu-waktu. Menurut Cutlip dan Center, opini publik terbentuk melalui empat tahapan, yaitu:

1. Ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari solusi alternatif.

2. Munculnya beberapa alternatif yang memungkinkan terjadinya diskusi untuk memilih alternatif.
3. Pengambilan keputusan dalam diskusi yang melahirkan kesadaran kelompok.
4. Untuk melaksanakan keputusan, disusunlah program yang memerlukan dukungan yang lebih luas.

Menurut Cutlip dan Center, opini publik merupakan hasil dari proses pertukaran informasi dan diskusi publik yang dipicu oleh suatu masalah. Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi atas masalah tersebut dan menghasilkan kesepakatan bersama yang kemudian diimplementasikan melalui program-program yang membutuhkan dukungan publik. Keputusan yang diambil dalam diskusi publik tersebut menghasilkan suatu opini publik yang disepakati bersama. Opini publik yang disepakati bersama ini kemudian diwujudkan dalam program-program yang membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah.

Pendapat lain tentang tahapan pembentukan opini publik, oleh Erikson dan Tedin (Iswandi, 2018) mengemukakan bahwa, dalam prosesnya opini publik terbentuk melalui empat tahapan, yaitu:

1. Muncul isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak.
2. Isu tersebut relatif baru hingga memunculkan kekaburan standar penilaian atau standar ganda.
3. Ada *opinion leaders* (tokoh pembentuk opini) yang juga tertarik dengan isu tersebut.
4. Mendapat perhatian pers hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut diketahui khalayak.

Opini publik, yang merupakan kesatuan pendapat atau pandangan mayoritas masyarakat tentang suatu permasalahan. Proses pembentukannya melibatkan faktor internal seperti tingkat pendidikan dan pengalaman dan faktor eksternal seperti media massa dan *opinion leaders*. Opini publik, mengacu pada sikap dan keyakinan kolektif masyarakat mengenai suatu isu atau permasalahan tertentu, terbentuk melalui proses diskusi

dan pertukaran ide untuk mencari solusi atas isu atau masalah yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, politisi, dan akademisi yang berperan sebagai *opinion leader*. Setelah melalui proses diskusi dan pertukaran ide, alternatif penyelesaian masalah dipilih dan diprogram untuk mendapatkan dukungan publik yang lebih luas. Memahami proses pembentukan opini publik penting untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terbentuk dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan.

3.2.2 Karakteristik Opini Publik

Karakteristik Opini Publik (Dan Nimmo, 2005):

1. Bahwa opini publik memiliki
 - a. Isi (tentang sesuatu isu atau objek),
 - b. Arah (percaya tidak percaya, mendukung menentang, dan sebagainya),
 - c. Intensitas (kuat, sedang, atau lemah).
2. Opini publik mengandung kontroversi, artinya sesuatu yang tidak disepakati oleh seluruh rakyat, ada yang sepakat dan yang tidak sepakat, atau mengandung pertentangan.
3. Opini publik mempunyai volume.

Berdasarkan kenyataan bahwa kontroversi itu menyentuh semua orang yang merasakan konsekuensi langsung dan tak langsung, meskipun mereka bukan pihak pada pertikaian semula. Sedikit atau banyaknya orang yang terlibat tertarik dengan isu kontroversi.
4. Opini publik relatif tetap.

Terjadi dalam kurun waktu yang tidak ditentukan berapa lama. Opini publik yang menghasilkan kontroversi sering bertahan agak lama bisa dilihat dari unsur-unsur budaya (norma) nilai yang melandasi pendapatnya.
5. Opini publik penampilannya pluralis artinya opini publik tidak identik dengan opini-opini lainnya.

Opini publik adalah kumpulan pendapat dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat secara umum tentang suatu isu atau masalah tertentu. Opini publik terbentuk melalui interaksi dan pengaruh berbagai faktor, termasuk media

massa, pemimpin politik, dan kelompok-kelompok sosial. Opini publik tidak terbentuk secara vakum, tetapi selalu diwarnai oleh konteks di mana ia muncul. Konteks ini dapat berupa objek yang menjadi isu, tempat di mana opini publik diungkapkan, dan waktu di mana opini publik terbentuk. Opini publik tidak hanya dipengaruhi oleh konteks, tetapi juga oleh opini-opini lain yang ada di masyarakat. Opini-opini ini dapat saling memperkuat, melemahkan, atau bahkan bertentangan satu sama lain.

Pendapat lain yang menjelaskan karakter Opini publik ditinjau dari berbagai pandangan yaitu Astrid Susanto dan Herbert Blumer.

Susanto, melihat dari ilmu publisistik bahwa suatu Opini publik mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemungkinan pro dan kontra, sebelum mencapai konsensus,
2. Melibatkan lebih dari seorang,
3. Dinyatakan,
4. Mengadakan atau mungkin mengadakan tanggapan yang pro maupun kontra. (Santoso, 1987).

Susanto, menyatakan bahwa Opini publik selanjutnya ditentukan oleh jarak geografis, pengetahuan. dan sikap kelompok.

Aktor politik memainkan peran penting dalam membentuk dan memengaruhi opini publik. Mereka memanfaatkan berbagai strategi untuk mengarahkan opini publik sesuai dengan kepentingan politik mereka. Aktor politik menggunakan berbagai strategi untuk membentuk opini publik, seperti penyebaran informasi, mobilisasi massa, pembentukan citra, dan suap dan lobi. Pada masa kampanye politik, para kandidat sering kali menggunakan media massa dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang platform dan visi mereka. Mereka juga mengadakan rapat umum dan demonstrasi untuk menarik dukungan publik. Selain itu, mereka membangun citra diri yang positif melalui iklan dan kampanye media sosial. Emory S. Bogardus (1949) dalam Anwar Arifin (2008)

mengemukakan bahwa opini publik mempunyai tiga fungsi sebagai keutuhan dalam kehidupan sosial dan politik, yakni:

1. Penguat undang-undang dan peraturan-peraturan.
Tanpa dukungan pendapat umum, undang-undang dan peraturan-peraturan tidak akan berjalan.
2. Pendukung moral dalam masyarakat.
3. Pendukung eksistensi lembaga sosial dan lembaga politik

Menurut Dan Nimmo (2005) fungsi kekuatan opini publik bagi komunikator politik dan institusi politik, yakni:

1. Menjadi kekuatan sosial.
2. Melanggengkan atau menghapuskan nilai dan norma dalam masyarakat.
3. Mengancam karier seseorang, keberadaan organisasi atau perusahaan.
4. Mempertahankan atau menghancurkan organisasi atau perusahaan.

Opini publik memiliki kekuatan besar dalam membentuk norma dan kekuatan sosial, bahkan mampu menghapus dan melanggengkan kekuasaan. Opini publik juga berperan penting dalam memperkuat kebijakan dan undang-undang. Opini publik dapat membantu komunikator politik menjalankan perundang-undangan, kebijakan, dan program. Opini publik juga merupakan dukungan moral bagi komunikator politik dalam memelihara dan mempertahankan pengaruh serta kekuasaannya. Dukungan media yang kuat dapat membantu pemerintah dalam membangun opini publik yang positif dan menjalankan pemerintahan dengan lebih mudah. Kesadaran akan pentingnya opini publik menjadi kunci bagi semua pihak yang terlibat dalam proses politik. Dalam sistem demokrasi, opini publik merupakan energi dan kekuatan vital bagi eksekutif dalam menjalankan pemerintahan.

3.3 Prinsip-prinsip Opini Publik ditinjau dari Aspek Psikologi, Sosiologi, dan Lingkungan

Opini publik mempunyai 3 jenis prinsip pendekatan yaitu pendekatan opini publik secara psikologis, sosiologis dan lingkungan.

3.3.1 Pendekatan Opini Public Secara Psikologis

Opini publik merupakan sikap orang-orang mengenai suatu isu atau masalah. Sikapnya itu adalah sikap manusia selaku pribadi maupun kelompok (S. Soenarjo, 1997). Opini publik merepresentasikan beragam pandangan dan perspektif. Opini individu terbentuk dari berbagai faktor, seperti pendidikan, pengalaman, perasaan, dan pengetahuan. Opini publik bersifat kolektif, bukan sekadar kumpulan pendapat individu. Opini publik dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Perubahan opini publik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peristiwa baru, informasi baru, dan pengaruh pemimpin, seperti politisi atau *influencer*. Penting untuk kritis terhadap opini publik dan mempertimbangkan berbagai sumber informasi sebelum membentuk pendapat pribadi. Memahami sifat dan cara kerja opini publik membantu kita mengidentifikasi isu penting, memahami respon masyarakat, dan merumuskan strategi komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi opini publik.

Astrid Soesanto (1975) menyatakan bahwa manusia pada umumnya mempunyai keinginan untuk mendasarkan tindakannya sebanyak mungkin atas pendapat umum (opini publik). Selanjutnya Soesanto menyatakan bahwa antara opini publik & sikap-sikap pribadi mempunyai hubungan yang erat. Pengalaman pribadi membentuk sikap individu, dan sikap ini juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi orang lain di lingkungan sekitar. Lingkungan sosial menyediakan norma-norma yang menjadi acuan bagi individu dalam menilai dan berperilaku. Norma-norma ini diinternalisasi oleh individu melalui proses belajar sosial dan memengaruhi cara pandang mereka terhadap berbagai hal. Sikap individu memengaruhi

cara mereka memproses informasi dan menafsirkan peristiwa. Ketika individu dihadapkan pada suatu isu, mereka akan cenderung melihatnya melalui lensa sikap mereka yang sudah terbentuk sebelumnya. Hal ini dapat memengaruhi opini yang mereka hasilkan tentang isu tersebut.

Contohnya, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama kemungkinan besar akan memiliki sikap yang religius. Sikap ini dapat memengaruhi opininya tentang berbagai isu, seperti pernikahan sesama jenis atau aborsi.

Opini publik umumnya muncul ketika terdapat permasalahan atau persoalan yang berdampak signifikan bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Permasalahan yang muncul ini bersifat mendesak dan membutuhkan penyelesaian segera. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan memicu munculnya masalah lain yang lebih kompleks dan sulit diurai. Ketidakpuasan dan keresahan masyarakat yang timbul akibat permasalahan ini melahirkan berbagai macam opini dan sudut pandang. Opini individu mengenai suatu kejadian atau masalah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas dan dampak masalah, kepentingan yang terhubung, dan konteks sosial individu sebagai makhluk sosial. Opini individu juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat pendidikan, pengalaman hidup, status sosial, latar belakang ekonomi, dan budaya asal.

Kekuatan opini seseorang dalam memengaruhi orang lain bergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah penerimaan opini tersebut oleh kelompok yang lebih besar. Opini publik yang diterima dan dipercaya oleh kelompok besar akan memiliki pengaruh yang signifikan, terutama jika opini tersebut berasal dari individu yang kredibel atau memiliki kedudukan penting dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemikiran mendalam tentang suatu masalah namun tidak memiliki kesempatan untuk mengemukakan opininya kepada orang lain, mungkin akan merasa frustrasi dan tidak puas. Sebelum mengemukakan opini, penting untuk mempertimbangkan opini dan sudut pandang orang lain. Opini yang dipikirkan matang dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, lebih kecil kemungkinannya untuk bertentangan

dengan opini umum. Sebaliknya, opini yang sejalan dengan kaidah-kaidah umum dan didukung oleh argumen yang kuat, lebih mungkin diterima dan mendapat tanggapan positif. Memahami opini publik dapat membantu individu dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang tepat, dengan mempertimbangkan kehati-hatian dan berbagai perspektif.

Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemikiran mendalam tentang suatu masalah, namun tidak memiliki kesempatan untuk mengemukakan opininya, mungkin akan merasa frustrasi dan tidak puas. Sebelum mengemukakan opini, penting untuk mempertimbangkan opini dan sudut pandang orang lain. Opini yang dipikirkan matang dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, lebih kecil kemungkinannya untuk bertentangan dengan opini umum. Sebaliknya, opini yang sejalan dengan kaidah-kaidah umum dan didukung oleh argumen yang kuat, lebih mungkin diterima dan mendapat tanggapan positif. Memahami opini publik dapat membantu individu dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang tepat, dengan mempertimbangkan kehati-hatian dan berbagai perspektif. Secara psikologis, opini publik memang dipengaruhi oleh individu-individu yang memiliki pengaruh dan kedudukan dalam organisasi profesi atau lembaga kemasyarakatan.

Sikap dan perilaku profesional yang berintegritas, seperti memanfaatkan situasi untuk kebaikan dan berlaku jujur, akan sangat dihargai dan dihormati oleh segenap anggota masyarakat. Sosok berintegritas yang mengemban tugas pekerjaan dengan berlandaskan kepentingan umum, akan dianggap mewakili profesinya dan opininya pun akan dipercaya sebagai suara profesi tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap opini sosok berintegritas ini, menjadikan opininya memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan dalam opini publik.

3.3.2 Pendekatan Opini Publik Secara Sosiologis

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, baik secara individu

maupun dalam kelompok. Interaksi sosial yang positif dapat memupuk kerja sama antar individu, baik dalam kelompok kecil maupun organisasi yang lebih besar. Kerja sama ini penting untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan kesejahteraan hidup dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Tindakan-tindakan manusia dalam interaksi sosial dan kerja sama kelompok dapat membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif dapat berupa peningkatan kesejahteraan, kemajuan ekonomi, dan solusi atas permasalahan bersama. Dampak negatif dapat berupa konflik, pencemaran lingkungan, dan kesenjangan sosial.

Contoh dampak positif interaksi sosial adalah gotong royong membersihkan lingkungan, yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Contoh dampak negatif interaksi sosial adalah tawuran antar kelompok, yang dapat menyebabkan kerusakan dan korban jiwa.

Perbedaan pandangan dalam menghadapi suatu permasalahan adalah hal yang alami dan tak terhindarkan. Hal ini dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti pengalaman hidup, latar belakang budaya, dan nilai-nilai individu. Perbedaan pandangan dapat menjadi tantangan dalam interaksi sosial dan kolaborasi, berpotensi memicu perdebatan, konflik, dan kesulitan dalam mencapai solusi bersama.

Pandangan individu terhadap suatu masalah, terutama yang bersifat kontroversial, dapat dipengaruhi oleh kelompok dan organisasi di mana mereka tergabung. Kelompok dan organisasi dapat memengaruhi pandangan individu melalui berbagai cara, seperti penyebaran informasi, diskusi internal, dan tekanan sosial. Pengaruh ini dapat membuat individu memiliki pandangan yang seragam dengan kelompoknya, meskipun mungkin tidak sesuai dengan keyakinan pribadi mereka.

Masalah kontroversial, seperti krisis ekonomi, sering kali melibatkan kepentingan umum, yaitu kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kelompok dan organisasi dapat memainkan peran penting

dalam menyuarakan kepentingan umum dan memengaruhi kebijakan yang terkait dengan masalah tersebut..

Krisis, seperti krisis ekonomi, politik, atau sosial, tidak terjadi secara terpisah, tetapi saling terkait dan dapat memperburuk satu sama lain. Krisis dapat memicu berbagai dampak negatif, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan sosial. Dampak ini dapat berakibat pada berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Selain memicu masalah baru, krisis juga dapat memperburuk masalah yang sudah ada, seperti kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan. Hal ini membuat situasi menjadi lebih kompleks dan sulit untuk diatasi. Sastroputro (1987) menyatakan bahwa perbedaan pandangan manusia itu bila mana orang berbicara tentang:

1. Demokrasi.
2. Kehidupan yang layak.
3. Keputusan yang adil.
4. Kemakmuran yang tinggi.
5. Hidup/pesta sederhana.
6. Batas kenakalan remaja yang wajar.
7. Harga-harga yang murah, dan lain sebagainya.

Munculnya berbagai permasalahan, terutama yang terkait dengan ekonomi, hampir selalu memicu perbedaan opini di kalangan masyarakat. Perbedaan opini ini melahirkan opini-opini di kalangan masyarakat dan para pakar, yang secara sosiologis membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kesepakatan. Opini para pakar, yang didasari oleh latar belakang keilmuan mereka, berkontribusi pada pembentukan opini publik yang lebih luas. Keberagaman alasan individu dalam menanggapi permasalahan ekonomi, termasuk latar belakang keilmuan, berkontribusi pada keragaman opini publik.

Opini publik adalah kumpulan pendapat dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat secara umum tentang suatu isu atau masalah tertentu. Opini publik terbentuk melalui interaksi dan pengaruh berbagai faktor, termasuk media massa, pemimpin politik, dan kelompok-kelompok sosial. Jika opini kelompok tertentu dianggap benar oleh sebagian besar individu

dalam masyarakat, maka opini tersebut dapat menjadi opini publik yang kuat dan diterima oleh berbagai pihak. Dukungan dari kelompok lain di luar kelompoknya sendiri, semakin memperkuat kekuatan individu atau kelompok dalam menyikapi permasalahan yang ada.

Kekuatan individu atau kelompok yang didukung opini publik dapat memengaruhi penyelesaian masalah dengan berbagai cara. Pertama, mereka dapat menekan pengambil kebijakan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan opini publik. Kedua, mereka dapat memobilisasi masyarakat untuk mengambil tindakan langsung, seperti demonstrasi atau boikot. Ketiga, mereka dapat menggunakan kekuatan media untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah tersebut.

Opini publik, yang mencerminkan sikap dan keyakinan kolektif masyarakat terhadap suatu isu, memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ranah sosial dan budaya. Meskipun akar permasalahan belum terselesaikan, pengaruh opini publik dapat memicu atau memperburuk masalah sosial dan budaya lainnya. Hal ini menegaskan kekuatan opini publik dalam konteks sosiologis, di mana individu dan kelompok saling terhubung dan memengaruhi perilaku serta tindakan satu sama lain melalui pandangan dan keyakinan bersama.

3.3.3 Pendekatan Opini Publik Secara Lingkungan

Pendekatan lingkungan adalah analisis yang menitikberatkan pada interaksi timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, aktivitas manusia menjadi fokus utama, dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan lingkungan abiotik, biotik, sosial, ekonomi, dan budaya. Manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki akal budi, kreativitas, dan kemampuan berkarya. Pendekatan ini menekankan pada analisis hubungan antara fenomena geografis tertentu dengan berbagai variabel lingkungan yang mempengaruhinya.

Dalam pendekatan lingkungan, kerangka analisisnya tidak mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alam saja, tetapi harus dikaitkan dengan:

1. Fenomena yang di dalamnya terliput fenomena alam beserta relik fisik tindakan manusia.
2. Perilaku manusia yang meliputi perkembangan ide-ide dan nilai-nilai geografis serta kesadaran akan lingkungan.

Ruang lingkup lingkungan geografis mencakup dua aspek utama, yaitu pengembangan nilai dan gagasan geografi, serta kesadaran lingkungan. Pengembangan nilai dan gagasan geografi terbagi menjadi dua aspek penting: lingkungan budaya gagasan-gagasan geografi dan proses sosial ekonomi dan perubahan nilai-nilai lingkungan. Lingkungan budaya gagasan-gagasan geografi mengkaji bagaimana gagasan-gagasan geografi berkembang dan dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat. Proses sosial ekonomi dan perubahan nilai-nilai lingkungan meneliti bagaimana proses sosial ekonomi dan perubahan nilai-nilai lingkungan memengaruhi cara pandang manusia terhadap ruang dan tempat. Kesadaran lingkungan berfokus pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lingkungan alam serta interaksi manusia dengannya. Tujuannya adalah untuk mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Lingkungan fenomena mengacu pada dua aspek utama: relik fisik tindakan manusia dan fenomena alam. Relik fisik tindakan manusia mencerminkan peran manusia sebagai agen perubahan lingkungan, termasuk dalam hal penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya. Fenomena alam mencakup produk dan proses organik, seperti flora dan fauna, serta produk dan proses anorganik, seperti batuan dan mineral.

Pendekatan lingkungan dalam geografi berfokus pada studi mendalam interelasi antara fenomena-fenomena geosfer tertentu dengan variabel kelingkungan yang mempengaruhinya. Pendekatan ini memainkan peran penting dalam memahami fenomena geosfer secara menyeluruh, sehingga memungkinkan perumusan solusi yang lebih efektif terhadap berbagai permasalahan lingkungan.

Terdapat beberapa tema analisis dalam pendekatan ekologis yang dikembangkan geografi, yaitu :

1. Analisis perilaku manusia terhadap lingkungan (*human behaviour-environment analysis*).

Fokus dari analisis tema ini adalah perilaku manusia baik perilaku sosial, perilaku ekonomi, perilaku kultural, dan bahkan perilaku politik yang dilakukan oleh seseorang atau komunitas tertentu.

2. Analisis aktivitas manusia terhadap lingkungan (*human activity/performance-environment analysis*).

Fokus dari analisis tema ini menekankan pada keterkaitan antara aktivitas manusia dengan lingkungannya. Kegiatan manusia ini terkait dengan tindakan manusia dalam menyelenggarakan kehidupannya, misalnya: Kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pertambangan, pembangunan perumahan, transportasi, dan lain sebagainya.

3. Analisis kenampakan fisik alami terhadap lingkungan (*physico natural features/performance-environment analysis*)

Fokus analisis dari tema ini menekankan pada keterkaitan antara kenampakan fisik alami dengan elemen-elemen lingkungan. Misalnya, setiap musim kemarau, muncul keluhan-keluhan masyarakat tentang berkurangnya air tanah sehingga terjadilah kekeringan. Selain itu musim kemarau menjadi semakin berat bagi masyarakat dikarenakan, kurangnya daerah resapan air yang menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah air tanah.

Dengan memahami prinsip-prinsip opini publik dari berbagai aspek, kita dapat memahami bagaimana opini publik terbentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemahaman ini penting untuk berbagai kepentingan, seperti: Menganalisa opini publik. Pemahaman tentang prinsip-prinsip opini publik dapat membantu kita untuk menganalisa opini publik tentang suatu hal. Mempengaruhi opini publik. Pemahaman tentang prinsip-prinsip opini publik dapat membantu kita untuk mempengaruhi opini publik tentang suatu hal. Mengelola opini publik.

Pemahaman tentang prinsip-prinsip opini publik dapat membantu kita untuk mengelola opini publik agar menguntungkan bagi kepentingan tertentu.

3.4 Pentingnya Kebijakan dalam Opini Publik

Menurut George R. Terry (1964) dalam Taufiqurakhman (2014) kebijakan diartikan sebagai sebuah petunjuk menyeluruh secara verbal, tertulis atau yang diimplikasikan yang menetapkan batas-batas umum serta arah di dalam mana tindakan manajer akan dilaksanakan. Sedangkan menurut Moh. Fakry Gaffar (2014) kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang mendasar dan komprehensif yang dapat dijadikan pedoman dalam tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian diatas, penulis berpendapat bahwa kebijakan merupakan dasar atau pedoman dalam pengambilan keputusan bagi manajer untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi sosial, ekonomi dan politik.

Penentuan kebijakan dari satu organisasi ke organisasi yang lain memiliki perbedaan. Perbedaan terjadi dikarenakan adanya perbedaan visi yang dimiliki oleh setiap pemimpin organisasi, misi atau tugas yang dimiliki oleh setiap organisasi, serta lingkungan dimana organisasi itu berada. Secara konvensional pembagian organisasi yang ada meliputi :

1. Organisasi Politik (Kongres, Partai Politik),
2. Organisasi Sosial (Organisasi Kependidikan, Organisasi Keagamaan, ataupun Organisasi lain yang berhubungan dengan manusia), dan
3. Organisasi Ekonomi (Organisasi yang berhubungan dengan Produksi, Distribusi Barang, Persamaan, serta Pelayanan).

3.4.1 Kebijakan Sosial

Organisasi sosial sering dikatakan sebagai organisasi yang tidak menitik-beratkan pada pencarian keuntungan karena organisasi sosial lebih mengutamakan aspek pelayanan. Walaupun demikian, demi kelanjutan dalam pelayanan organisasi sosial tidak boleh sampai merugi.

Organisasi sosial memiliki kebijakan yang terbagi atas beberapa bagian, seperti :

1. Kesejahteraan,
2. Kesehatan,
3. Pendidikan,
4. Perumahan,
5. Ketenagakerjaan, dan
6. Pengupahan.

Meskipun berada dalam organisasi bidang sosial, kebijakan yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan dengan kebijakan bagian yang lainnya. Misalnya kebijakan dalam bidang pendidikan memiliki empat strategi dasar yaitu pemerataan, relevansi, kualitas dan efisiensi. Sedangkan, kebijakan dalam bidang pengupahan akan berlandaskan pada tujuan untuk melindungi para pekerja agar tidak terjadi pengupahan yang tidak sesuai atau sangat rendah.

Kebijakan sosial memiliki beberapa tipe yang terbagi atas (Demitrius Iatridis, 1994) sebagai berikut :

1. Kebijakan *Laissed Faire* yaitu tipe kebijakan yang ada dalam suatu masyarakat dengan bobot intervensi yang sangat rendah.
2. Kebijakan Rasional yaitu tipe kebijakan dalam nuansa dan ilmu pengetahuan dalam penetapan kebijakan. Tipe ini biasanya didominasi oleh yang profesional dan berdisiplin dalam tugasnya (analisis kebijakan).
3. Kebijakan Normatif yaitu tipe kebijakan yang bertolak belakang dengan tipe Kebijakan Rasional. Tipe ini menerima dan menggunakan konsep nilai dan prinsip tanpa membuang pentingnya prosedur rasional dan objektif.
4. Kebijakan Advokasi yaitu tipe kebijakan yang dasarnya adalah kepentingan klien. Oleh karena itu, seluruh kekuatan yang ada baik dalam individu, kelompok, maupun masyarakat diarahkan pada upaya melindungi klien.

Berdasarkan pada tipe kebijakan yang disebutkan diatas yang kemudian dihubungkan dengan karakteristik yang dimiliki oleh organisasi sosial, maka kebijakan organisasi-organisasi sosial lebih mendekati pada tipe kebijakan Normatif yang dalam pengertiannya lebih didasarkan pada nilai dan prinsip-prinsip pelayanan tanpa menghilangkan prosedur rasional.

Demitrius Iatridis (1994) juga mengatakan ada beberapa kebijakan yang terbagi dalam beberapa sub tipe, antara lain :

1. Kebijakan Komprehensif
2. Kebijakan Strategik
3. Kebijakan Kontingensi
4. Kebijakan Tambahan
5. Kebijakan Birokrasi
6. Kebijakan Campuran

Tahapan dalam kebijakan sosial terdiri dari dua tahap utama yang berurutan: tahap analisis dan tahap penerapan. Tahap analisis bertujuan untuk memahami permasalahan yang akan diatasi dan merumuskan solusi yang tepat, sedangkan tahap penerapan bertujuan untuk melaksanakan solusi tersebut secara efektif. Tahap analisis terdiri dari beberapa langkah yaitu, definisi permasalahan. Merumuskan permasalahan sosial yang akan diatasi secara jelas dan terukur, Identifikasi isu-isu guna mengidentifikasi berbagai aspek dan faktor yang terkait dengan permasalahan tersebut, analisis sejarah, identifikasi oleh lembaga pembuat kebijakan, dan permodelan.

Tahap analisis dan tahap penerapan dalam kebijakan sosial saling terkait erat. Hasil dari tahap analisis menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang tepat, dan tahap penerapan merupakan proses untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif.. Secara rinci aktifitas tahapan kebijakan itu meliputi :

1. Pengumpulan informasi mengenai permasalahan sosial, kondisi sosial serta peluang bagi pengembangan.
2. Menentukan rangkaian pengalaman dalam suatu konsep serta mendefinisikan permasalahan pendamping serta isu-isu yang bersangkutan.
3. Mendesain metodologi.

4. Memilih dan melakukan teknik analisis atas faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan sosial.
5. Mengembangkan beberapa kesimpulan, mempertimbangkan serta argumentasi dan prediksi hasil dari kebijakan.
6. Menyampaikan rekomendasi kepada para pengguna (pengambil keputusan, kelompok, organisasi, komunitas).

Selanjutnya rangkaian kegiatan tersebut dikelompokkan pada tiga kategori aktifitas tahap perencanaan kebijakan (Demitrius Iatridis, 1994) yaitu :

1. Aktifitas analisis masalah,
2. Aktifitas formulasi dan rekomendasi,
3. Aktifitas mengkomunikasikan pada klien.

Sedangkan, pada tahapan penerapan kebijakan sosial terdiri atas rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Mendesain proyek untuk penerapan guna direkomendasikan menjadi sebuah kebijakan.
2. Mengamankan dan mengorganisasikan sumber daya alam dan manusia yang berkaitan dengan kebijakan.
3. Mengkomunikasikan tanggapan organisasi atas proyek dan menjelaskan tujuan, jangkauan, prosedur termasuk aturan bagi pelaksana.
4. Melengkapi dengan arahan operasional untuk penerapan dan evaluasi.
5. Mengorganisasikan dan memonitor proyek serta penerapan tugas.
6. Mengevaluasi dampak dari intervensi membandingkan hasil dengan evaluasi.
7. Menyeleksi prosedur dalam penerapan.
8. Merekomendasi kelangsungan atau ketidaklangsungan dari dampak.
9. Mengkomunikasikan dampak pada sasaran.

Rangkaian aktifitas dari tahapan penerapan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori aktifitas yaitu :

- a. Aktifitas pengorganisasian dan penerapan,
- b. Aktifitas penerapan dan monitoring,

- c. Aktifitas evaluasi hasil.

3.4.2 Kebijakan Ekonomi

Organisasi atau lembaga ekonomi memiliki karakteristik utama, yaitu orientasi pada pencapaian keuntungan atau laba. Orientasi pada keuntungan ini mendorong organisasi atau lembaga ekonomi untuk menerapkan kebijakan rasional. Kebijakan rasional ini dirumuskan berdasarkan ilmu pengetahuan dan analisis data oleh para profesional yang berpengalaman, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan memaksimalkan keuntungan. Kebijakan rasional memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut: berbasis data dan analisis, menggunakan metode kuantitatif, melibatkan profesional, dan menekankan efisiensi.

Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Perusahaan ini juga melibatkan para insinyur dan ekonom dalam proses pengembangan produk baru untuk memaksimalkan keuntungan.

Menurut Sune Carlson (1969) mengatakan bahwa terdapat empat kekuatan yang dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan, antara lain :

1. Pengetahuan teknik yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan produksi atau pengetahuan tentang kombinasi yang mungkin dalam jasa dan output produksi.
2. Permintaan produk yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan posisi pasar produk.
3. Pengetahuan suplay faktor yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan kuantitas produk dengan harga.
4. Pengetahuan situasi suplay dana modal guna membeli faktor-faktor produksi.

3.4.3 Kebijakan Politik

Perumusan kebijakan politik dihadapkan pada berbagai kesulitan yang kompleks. Kesulitan ini timbul karena masyarakat yang heterogen dengan berbagai nilai dan

kepentingan yang berbeda-beda. Keragaman nilai ini dapat menimbulkan perdebatan dan konflik dalam proses perumusan kebijakan, karena setiap kelompok ingin kepentingannya diakomodasi. Proses perumusan kebijakan sering kali melibatkan kompromi politik antar para pengambil kebijakan. Kompromi ini, meskipun diperlukan untuk mencapai kesepakatan, dapat menghasilkan kebijakan yang tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Hal ini karena kebijakan tersebut mungkin lebih didasarkan pada kepentingan politik daripada kebutuhan riil masyarakat.

Contohnya, dalam merumuskan kebijakan terkait pendidikan, terdapat perbedaan pendapat antara kelompok yang menginginkan pendidikan gratis dengan kelompok yang ingin mempertahankan sistem biaya pendidikan. Kompromi yang dicapai mungkin menghasilkan kebijakan yang tidak memuaskan kedua belah pihak dan tidak secara efektif menyelesaikan masalah pendidikan.

Menurut Charles E. Lindblom (1986) untuk mengkaji perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui pembagian perumusan kebijakan ke dalam tahapan-tahapan yang kemudian dianalisis. Tahapan analisis kebijakan yang dimaksud adalah :

1. Bagaimana masalah timbul dan masuk ke dalam agenda para pengambil keputusan.
2. Bagaimana masyarakat merumuskan masalah-masalah tersebut untuk pengambilan tindakan.
3. Sikap apa yang diambil oleh Badan Legislatif atau Badan lainnya.
4. Bagaimana para pemimpin menerapkan kebijakan itu.
5. Bagaimana kebijakan tersebut dapat dievaluasi.

Salah satu opini ataupun tuntutan yang juga dukungan memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan politik atau pemerintah yang muncul dari kelompok dunia usaha. Para pejabat harus memberikan perhatian khusus kepada dunia usaha seperti mengetahui apa yang mereka butuhkan, menyediakan segala kebutuhan dunia usaha dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi, dan memberikan hak-hak

khusus untuk berkonsultasi dan berperan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan.

Proses bagaimana sebuah opini baik berupa tuntutan maupun dukungan menjadi sebuah kebijakan (output) dapat dikaji sebagai berikut (David Easton, 1953) :

1. Tahap proses pengubahan tuntutan yang disampaikan menjadi alternatif kebijakan. Pada tahapan ini Gabriel Almond & Bingham Powell (1966) dalam Heni W. Nengsi (2018) menyebutnya dengan tahapan Agregasi Kepentingan. Tahapan berikutnya baru memasuki tahapan pembuatan kebijakan.
2. Tahapan pembuatan kebijakan merupakan proses untuk mengubah tuntutan menjadi Output yang antara lain dapat berupa peraturan-peraturan yang mampu menanggapi kepentingan dan tuntutan yang masuk ke dalam agenda pemerintahan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan artikulasi kepentingan.
3. Tahapan artikulasi kepentingan.
Tahapan artikulasi kepentingan, tahapan agregasi kepentingan, dan tahapan pembuatan keputusan dapat memungkinkan terjadinya tumpang tindih. Hal ini terjadi selain karena batasan diantara ketiga aktivitas itu sangatlah tipis, dapat juga terjadi karena partisipan yang sama dalam pembuatan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel., G. Bingham, Powell. 1966. *Comparative Politics : A Development Approach*. Boston : Little Brown.
- Easton, David. 1953. *The Political System : An Inquiry Into The State Of Political Science*. New York : Knopf.
- Gaffar, M., Fakry. 2014. Handout Teori dan Praktek Analisis Kebijakan Pendidikan : Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Iatridis, Demetrius. 1994. *Sosial Policy : Institutional Context of Social Developmentand Human Services*. United States of America : Brooks/Cole Publishing Company.
- Lindblom, Charles, E. 1986. Proses Penetapan Kebijakan (terjemahan dari Ardian Syamsudin). Jakarta : Erlangga.
- Nengsi, Heni, W. 2018. Kesadaran Kewargaan dalam Agregasi Kepentingan. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik : Pendeligan Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Cetakan Pertama. Jakarta : Universitas Moestopo Beragama (Pers).

BAB 4

KEPEMIMPINAN POLITIK:

Dinamika Kepemimpinan Politik Presiden dalam Arus Politik-Kebijakan di Indonesia

(Studi Analisis Masa Kepemimpinan Sukarno-Jokowi)

Oleh Maulana Malik Ibrahim

4.1 Pendahuluan

Kepemimpinan politik dalam sebuah masa dapat didefinisikan sesuai dari sudut pandang masyarakat melihatnya. Sebab, subjektivitas pandangan memengaruhi perspektif yang diambil dalam melihat dinamika kepemimpinan seseorang. Northouse (2010) menjelaskan mengenai konsep kepemimpinan sebagai sebuah praktek atas teori tindakan memengaruhi orang lain dengan menggunakan pikiran, daya pikat, dan arahan bersifat langsung. Konsep Northouse, juga pernah disinggung oleh Nietzsche dalam terminologi politik *will to power*, bahwa kepemimpinan atau politik merupakan cara-cara untuk memengaruhi serta mendorong rekognisi bagi orang lain (Nietzsche, 2019). Namun, beberapa sumber dari teori-teori kepemimpinan diambil dari kenyataan-kenyataan sejarah yang berhasil dan gagal; seperti contohnya, Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela yang mengupayakan pembebasan dari opresi negara kolonial, serta paradox keberhasilan—dapat dikatakan gagal mempertahankan ide kebebasan- pemimpin dalam menunjukkan jalan terang pembebasan, namun di suatu fase berubah menjadi seorang tiran, layaknya Napoleon dan Sukarno.

Dinamika kepemimpinan politik sudah seharusnya mengalami difusi dengan etika politik, karena setidaknya etika menjadi pelindung bagi pemimpin dalam membuat langkah-langkah kebijakan strategis. Magnis Suseno (2015) menjelaskan soal etika politik sebagai prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin. Macam-macam teori otoritas kepemimpinan Weber (dalam

Thoha, 1983) yang termasuk otoritas tradisional, karismatik, dan legal-rasional tidak akan berjalan secara fungsional apabila mengindahkan etika politik dalam sebuah spektrum kenegaraan. Etika politik secara fungsional dalam negara memainkan peran sebagai basis fundamental pengambilan kebijakan, melihat konflik, serta menerima fakta sejarah yang sedang dan/atau akan berlangsung. Banyak dari pemimpin-pemimpin dunia pada akhirnya terjebak dalam konsep politik kepemimpinan, namun tidak dibarengi dengan kesiapan ketika jatuh dari tampuk kekuasaan, seperti Donald Trump dan Joir Bolsonaro.

Kesinambungan kuasa kepemimpinan dapat disebut sebagai sirkulasi elite politik, baik petahana *status quo* yang bertahan sebagai pemimpin, atau oposisi yang memenangkan kontestasi politik dalam sebuah negara. Tujuan sirkulasi elite politik memperbarui atau mematangkan ide-ide ketatanegaraan yang berjalan statis dalam masa pemerintahan sebelumnya, dapat juga diartikan sebagai penumbangan kekuasaan lewat cara-cara konstitusional. Memahami dinamika sirkulasi elite dan kepemimpinan sama dengan memahami artefak kesejarahan tentang negara dan perkembangannya. Maka dari itu, analisis mendalam perlu dilakukan secara komprehensif dan integral sesuai dengan perkembangan zaman dan memerhatikan fakta sejarah (Horowitz, 2014).

Bangsa Indonesia sendiri mengenal pemimpin negara sebagai suatu simbol yang perlu dijaga muruahnya, namun di sisi lain para pemimpin tersebut meninggalkan beberapa catatan minor yang tidak bisa diselesaikannya. Sukarno, Soeharto, B. J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo memiliki turbulensi dan permasalahan politik masing-masing yang mengguncang tubuh pemerintahan mereka. Kelebihan dan kekurangan akan di bahas dalam bab ini sebagai sebuah konsekuensi logis adanya persoalan bangsa dan negara. Kemunculan dan transformasi kekuasaan tiap-tiap masa kepemimpinan juga akan dibahas secara detil tanpa mengaburkan fakta-fakta disekelilingnya dan bersamaan dengan itu akan dilihat sebuah garis kepemimpinan di Indonesia

4.2 Dinamika Kepemimpinan Politik Presiden dari Masa ke Masa

4.2.1 Sukarno: Kepemimpinan Politik ‘Orang Besar’ dan Demokrasi Terpimpin

Mengidentifikasi dan menganalisis Sukarno sebagai individu merupakan kesukaran yang tidak tertandingi. Paradoks kehidupannya di masa muda yang memimpikan kebebasan sebuah negara bernama “Hindia-Belanda” ditulisnya dalam sebuah buku berjudul *“Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”*, nyatanya di masa kepemimpinan politiknya ia malah membelenggu kebebasan itu sendiri. Dari segi kepemimpinan politiknya, Soe Hok Gie menyebut Sukarno memimpin Indonesia layaknya *“Raja-Raja Jawa”*. Di masa muda ia berjuang bersama rakyat untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa, meskipun seringkali dengan Hatta di cap sebagai kolaborator Jepang oleh pihak-pihak yang menentanginya (Adams, 1965).

Setelah kemerdekaan, ia terpilih menjadi pemimpin rakyat di tengah kemelut Agresi Militer I dan II, serta pergolakan partai politik dalam sistem parlementer. Dari sini, merujuk *“The Great Man Theory”* atau teori orang besar serta otoritas kharismatik, Sukarno mampu mengatasi suasana tersebut dengan intelegensi dan karismanya, meskipun dengan cara-cara yang eskstrem—mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. Keluarnya dekrit tersebut menandai pergeseran kepemimpinan politik serta situasi demokrasi yang ada di Indonesia ke arah otoritarianisme. Harapan yang disuarakan oleh masyarakat Indonesia untuk megawali babak baru kenegaraan dengan sebuah sistem yang lebih demokratis, malah berbanding terbalik ketika Sukarno memutuskan untuk memilih Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Panglima Besar Revolusi. Feith (1988) menerangkan fenomena Demokrasi Terpimpin ini sebagai degradasi demokrasi yang dipimpin langsung oleh pemimpinnya sendiri—yaitu Sukarno. Hal yang paling memungkinkan memperbaiki demokrasi Indonesia saat itu ialah mengembalikan ke posisi semula sebagai demokrasi liberal.

Munculnya doktrin Manifesto Politik (Manipol) USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) alih-alih mengembalikan demokrasi liberal dan memberi rakyat keleluasaan dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi. Sukarno pada demokrasi terpimpin melakukan sentralisasi kekuatan di tangannya yang menyebabkan kepemimpinan politiknya tidak dapat digoyah oleh kekuatan apapun. Disamping itu, Sukarno dekat dengan kelompok atau kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Darat (AD) untuk menjaga stabilitas massa dan militer sekaligus. Seperti yang disampaikan oleh Mortimer (2006) siasat itu merupakan cara bagi Sukarno agar tidak kehilangan dua kekuatan yang sama besar pengaruhnya dalam konstelasi politik Indonesia saat itu. Namun, kedekatan Sukarno dengan PKI menimbulkan banyak pertanyaan di kubu AD, yang menyatakan bahwa Sukarno lebih pro terhadap PKI dibandingkan kekuatan AD.

Polemik antara PKI dan AD ini bukan satu-satunya kemelut dalam Demokrasi Terpimpin yang sedikit banyak merongrong kepemimpinan politik Sukarno. Tidak hanya itu, politik-kebijakan yang diterapkan Sukarno membawa Indonesia pada situasi pembredelan pers, pemenjaraan musuh politik—seperti Sjahrir dan Roem-, hingga krisis ekonomi—Inflasi 600%-ditengarai menyebabkan krisis politik tumbuh ditubuh kepemimpinannya. Sikap Sukarno yang keras dan melakukan konfrontasi-konfrontasi kemiliteran seperti "*Ganyang Malaysia*" membuat kelompok AD menentangnya seperti yang disampaikan oleh Ali Moertopo. Dalam hal ini AD malahan memainkan strategi untuk melawannya secara halus, dengan cara-cara propaganda yang berbanding terbalik sesuai keinginan Sukarno; seperti menyebarkan pamflet-pamflet dan menerbitkan koran palsu anti pengganyangan Malaysia.

Hingga akhirnya meletus Gerakan 30 September (G30S) atau Gestapu yang membuat Sukarno kehilangan pamor politik dan ditendang dari tampuk kekuasaannya oleh Soeharto dan kelompok AD (Sundhaussen, 1986). Pasca kekuasaan Sukarno runtuh, ekses-ekses politik seperti kekuatan PKI dan *onderbouw*-nya dibersihkan dalam konstelasi politik Indonesia.

Terjadi pembantaian pada kelompok komunis sebagai konsekuensi logis kedekatan kelompok tersebut dengan Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Hingga akhir hayatnya karisma dan intelegensia Sukarno seperti yang dijelaskan dalam *The Greatman Theory* dan otoritas kharismatik tidak mampu menyelamatkan dirinya dan kekuasaannya. Sejarah memaksa terjadinya sirkulasi elite dan kekuasaan untuk memberikan posisi penting AD dalam mengendalikan negara Indonesia di bawah haluan orde baru.

4.2.2 Soeharto: Otoritarianisme, Aparatus Negara, dan Depolitisasi Massa

Jatuhnya Sukarno setelah peristiwa G30S mengubah peta politik serta konfigurasi kepemimpinan politik Indonesia. Sukarno seperti kehilangan daya tawar dan posisi dalam konstelasi politik pasca demokrasi terpimpin (1959-1965). Namun, peristiwa G30S tidak dapat menjadi sebuah simpul konklusi mengapa proklamator Indonesia tersebut mengalami nasib tragis dipengujung karirnya. Krisis politik dan kepercayaan juga menjadi pemicu situasi yang kacau di pertengahan tahun 60-an, hal ini disebabkan oleh kemampuan pemuda dan mahasiswa yang digandeng oleh AD dalam mengelola isu atau propaganda melawan pemerintahan Sukarno (Tim Tempo, 2016). Pada masa-masa krisis tersebut, muncul *common enemy*; yaitu PKI yang dianggap sebagai dalang pemberontakan G30S, juga karena kedekatannya dengan kekuasaan demokrasi terpimpin. Hal tersebut mendorong lahirnya Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura); 1). Pembubaran PKI bersama ormas-ormasnya; 2). Perombakan Kabinet Dwikora; 3). Turunkan Harga Pangan. Kemarahan rakyat pada PKI menyambar juga kepada Sukarno. Suasana ini dimanfaatkan oleh kekuatan AD untuk mengambil alih kekuasaan lewat Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Surat ini yang nantinya mengawali keberlangsungan pemerintahan Soeharto dan orde baru selama 32 tahun mendatang.

Soeharto menguatkan kaki-tangan rezim melalui penempatan aparatus-aparatus negara yang selama masa berjalannya pemerintahan kerap kali memberikan dampak

signifikan dalam hal membatasi hak-hak sosial-politik masyarakat. Aparatus negara diklasifikasikan menjadi tiga bagian yang langsung dikendalikan oleh negara; *Pertama*, aparatus represif, strategi yang digunakan ialah menundukkan masyarakat dengan cara kekerasan dan intimidasi (secara fisik atau psikologis)—wujud aparatus represif dapat berupa instansi kemiliteran atau ABRI, birokrasi-administratif, serta pengadilan. *Kedua*, aparatus ideologis, strategi yang digunakan orde baru dalam hal ini ialah manipulasi dan hegemoni—wujud aparatus ideologis berupa program Penataran Pedoman Penghayatan Pancasila (P4) dan mewajibkan mengganti seluruh asas organisasi menggunakan ideologi Pancasila. *Ketiga*, pengendalian stabilitas politik melalui jargon “demi stabilitas ekonomi”, manifestasi aparatus ini dapat dilihat dari Trilogi Pembangunan Soeharto—Stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan.

Ketiga aparatus negara di atas memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, yang hal tersebut merupakan salah satu penguatan yang dilakukan oleh Soeharto di masa kepemimpinannya. Sistem aparatus negara menandai gaya atau tipe kepemimpinan Soeharto yang otoriter. Menurut Northouse (2010) gaya atau tipe kepemimpinan otoriter merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang mengedepankan tujuan kerja, dan jalur pencapaian tujuan atau *Path-Goal Theory* (Teori Jalur Tujuan). Teori ini dapat diasosiasikan lewat model-model pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang mengutamakan infrastruktur dan hasil pencapaian pembangunan. Penurunan angka kemiskinan menjadi bukti konkret pada masa Orde Baru sedari 70 Juta Jiwa (60%) di tahun 1970 menuju 22, 5 Juta Jiwa (11,3%) di tahun 1996 (Muzzaqi, 2019).

Namun, sejumlah pencapaian di masa orde baru menegaskan perkembangan hak sosial-politik masyarakat, khususnya pada sektor demokrasi—program depolitisasi massa. Depolitisasi massa memberikan efek kejut yang begitu mematikan terhadap demokrasi Indonesia. Untuk menciptakan daya kepatuhan, Soeharto melalui programnya menerapkan praktek fusi partai politik ke dalam tiga bagian yang menjadi

perwakilan dari masing-masing kelompok kepentingan. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mewakili golongan-golongan nasionalis, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewakili golongan-golongan islam, serta Golongan Karya (Golkar) mewakili ABRI dan kelompok-kelompok pemerintah. Depolitisasi massa—yang lebih sering disebut penegasian hak politik masyarakat—juga tercermin dalam pembuatan-pembuatan wadah organisasi yang mudah dikontrol pemerintah; seperti, Korps Pegawai Republik Indonesia (KOPRI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) (Henriques & Dwifatma, 2015).

Proses depolitisasi menghasilkan pola massa mengambang “*floating mass*” akibat dari proses kooptasi negara terhadap kehidupan sosial-politik masyarakat. Ketidakberdayaan individu dalam melawan negara menjadi sebuah persoalan penting yang disorot dalam masa kepemimpinan otoriter Soeharto. Hal tersebut juga yang menyebabkan Soeharto dapat melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun lamanya. Namun, proses-proses tersebut lambat laun mengalami kebuntuan dan terjadi sirkulasi kepemimpinan elite digantikan oleh sistem demokrasi yang sedang menyebar dari Eropa ke Asia (Uhlir, 1997). Krisis ekonomi dan politik merupakan momen puncak serta variabel pelengkap untuk menggulingkan kekuasaan Soeharto, dan merubah tatanan politik dari “orde baru” menuju “reformasi”.

4.2.3 B. J. Habibie: Demokratisasi Kepemimpinan Politik Pasca Orde Baru

Sirkulasi penggantian elite kekuasaan dari orde baru menuju reformasi merupakan babak baru dimulainya perjalanan demokrasi di Indonesia. Aspinall & Berenschot (2010) menjelaskan bahwa reformasi membawa antusiasme dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Desakan-desakan dari segala penjuru berdatangan mulai dari tokoh nasional, oposisi, hingga gerakan massa. Mereka semua menginginkan jaminan kehidupan demokratis untuk mengatasi krisis multidimensional warisan pemerintahan Soeharto. Aparatus

negara yang digunakan dalam pemerintahan orde baru direduksi lewat politik-kebijakan Habibie yang mendorong proliferasi kehidupan demokratis; seperti, pengesahan sistem multipartai, diterbitkannya beberapa undang-undang (UU) pers dan kebebasan berpendapat, hingga pembebasan tahanan politik (Tapol) masa Soeharto (Habibie, 2006).

Demokratisasi kepemimpinan Habibie dapat dimaknai sebagai signifikansi perubahan yang gradual, sebagai akibat adanya gelombang demokratisasi ketiga di dunia. Fenomena-fenomena kebijakan yang berbanding terbalik dengan orde baru merupakan bentuk perwujudan *political will* Habibie memperbaiki situasi pemerintahan dan membereskan sisa kekacauan dalam masyarakat. Menurut Northouse (2010) kepemimpinan demokratis merupakan kepemimpinan yang berkomitmen penuh dengan proses-proses integral dari sistem demokrasi. Pembukaan ruang publik politis yang selama masa orde baru membelenggu masyarakat meningkatkan semangat pemenuhan hak-hak dalam agenda reformasi. Kepemimpinan Demokratis Habibie dapat dilihat dari dukungan rakyat atas beberapa kebijakan, dan hal ini memberikan efek kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pasca kepemimpinan Soeharto.

Secara objektif, menurut Bilveer Singh (2000) demokratisasi kepemimpinan Habibie menguat setelah pilar-pilar demokrasi di Indonesia bebas dari intervensi negara; contoh paling mutakhir ialah proliferasi media di awal reformasi sebagai bentuk komitmen pemerintahan terhadap demokrasi. Diterbitkannya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers membuat yang awalnya jumlah media cetak pada masa orde baru tercatat sebanyak hanya 280 unit, mengalami perkembangan pesat menjadi 1.070 unit. Kebebasan ini juga mencerminkan kebebasan dari ketakutan untuk mengonsumsi media dari manapun. Selain hal tersebut, cerminan demokratisasi politik-kebijakan terlihat dalam hal penentuan pendapat Timor-Timur yang selama masa 1975-1998 menjadi sengketa kenegaraan bagi kelompok-kelompok kepentingan yang Pro-Integrasi Indonesia dan Pro-Kemerdekaan Timor-Timur. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, Habibie memberikan

instruksi untuk melaksanakan jajak pendapat rakyat sebagai manifestasi terbukanya ruang publik politis. Hasilnya, Timor-Timur memisahkan diri dari Indonesia dengan catatan 78,5% penduduk menyetujui hal tersebut.

Habibie juga memberikan peninggalan demokrasi yang tidak kalah penting, yaitu perkembangan partai politik dalam kontestasi pemilu 1999. Berdasarkan catatan Departemen Kehakiman dan HAM (1999) sebanyak 141 partai politik terdaftar sebagai peserta pemilu 1999 dan ingin berkontestasi setelah runtuhnya orde baru. Akan tetapi, hanya 48 partai politik yang berkontestasi secara penuh untuk bertarung mempertahankan aspirasi rakyat di DPR. Sirkulasi elite politik di tahun-tahun awal masa reformasi beberapa kali mengalami kebuntuan seiring ditemukannya massifnya sistem kapitalisme dan oligarki negara. 48 partai politik dalam demokratisasi hanya menjadi catatan yang lambat laun akan dikenang dalam sejarah sebagai bagian sejarah kepemiluan. Namun, tidak dengan prosesnya yang hanya dikuasai oleh elite-oligark pasca orde baru.

Setidaknya dengan adanya banyak partai-partai politik baru pada Pemilu 1999, merepresentasikan terbukanya ruang publik politis dan adu gagasan kepentingan. Dalam hal ini menjadi bukti kuat demokratisasi kepemimpinan di era Habibie, seperti adanya reaktivasi ruang publik dan opini publik yang selama masa kepemimpinan Soeharto terbelenggu oleh politik-kebijakan otoriter. Fungsi ruang publik dan opini publik sebagai filter dalam menyaring kepentingan serta interferensi yang sifatnya anarkistis. Diskursus praktikal dalam demokrasi Indonesia pasca orde baru, yaitu membentuk opini publik sehingga hal tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan agenda reformasi.

4.2.4 Gus Dur dan Megawati: Kemelut Perebutan Kepemimpinan Politik dan Politik-Kebijakan

Gus Dur dan Megawati merupakan pasangan presiden dan wakil presiden yang memenangkan kontestasi kepemiluan pertama pasca orde baru di tahun 1999. Kiprahnya tidak lepas dari kontroversi dan beberapa politik-kebijakan yang tepat

ataupun tidak tepat sasaran kepada masyarakat. Dalam konteks ini, akan dibedah cara pandang masing-masing dari Gus Dur dan Megawati hingga konflik yang memecahnya pada tahun 2001, ketika lengsernya Gus Dur dari kursi kepemimpinan politik pada saat itu. Seringkali, Gus Dur diasosiasikan dengan kepemimpinan moralis, seorang yang mencintai pluralism, serta tidak memandang segala perbedaan sebagai sebuah permasalahan yang mendasar (Naim, 2014). Sedangkan Megawati dipandang sebagai seorang yang memiliki sifat kepemimpinan simbolik, sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia yang memiliki reputasi sebagai anak presiden pertama Indonesia, yaitu Ir. Sukarno (Irmalinda & Magriasti, 2022).

Secara definisi, kepemimpinan politik moralis ialah gaya kepemimpinan politik yang paling menghargai bawahannya, memiliki empati yang tinggi, serta tidak stabil secara emosi dan tindakan. Terkadang dapat tampak sedih dan mengerikan, namun juga dapat sangat menyenangkan dan bersahabat dengan siapapun (Northouse, 2010). Dalam konteks tipologi kepemimpinan Gus Dur, hal ini sangat terlihat secara jelas ketika beberapa politik-kebijakan langsung memberikan efek lanjutan kepada akseptabilitasnya. Pengesahan agama yang diakui oleh pemerintahan Gus Dur dan pemberian jatah libur hari raya kepada masyarakat Konghucu menandakan arti bahwa Gusdur adalah seorang moralis sekaligus pluralis pada satu kesempatan yang sama. Politik-kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur bukan hanya sebuah prosesi seremonial, namun sebuah agenda substansial untuk mengatasi masalah diskriminasi etnis Tionghoa di sekitaran masa Reformasi.

Berbeda dengan Gus Dur, Megawati yang memiliki corak kepemimpinan politik bersifat simbolik, yang dapat diartikan secara definitif sebagai kepemimpinan yang memiliki arti yang sangat sempit. Keberadaannya merupakan sebuah sirkulasi elite politik dalam kekuasaan untuk menghancurkan bangunan historis dan kultural (Irmalinda & Magriasti, 2022). Megawati tampil dalam konstelasi politik nasional setelah Gus Dur dilengserkan melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI MPR), pada tahun 2001.

Kepemimpinan perempuan di Indonesia masih menjadi hal yang tabu untuk dilaksanakan. Hal ini berdasarkan fakta kepemiluan yang menetapkan ambang batas representatif perempuan 30% selalu tidak terpenuhi di dalam parlemen. Fakta tersebut disebabkan akibat bentuk sistem politik Indonesia yang mengarah kepada sistem patrilineal dan patronase (Aspinall & Berenschot, 2019).

Di Era Gus Dur (1999-2001) terdapat beberapa manuver politik yang sempat menjadi bola panas bagi Gus Dur sendiri. Awalnya Gus Dur yang memiliki posisi tawar dari poros tengah mendadak kehilangan daya tawar tersebut akibat kebijakan-kebijakan yang bersebrangan dengan “pimpinan-pimpinan partai”. Menurut Utama (2019) faktor utama penggulingan Gus Dur akibat berebutnya kekuasaan disekitaran Megawati dan Amien Rais. Amien sebagai ketua MPR saat itu, memiliki keleluasaan akses untuk menekan secara politik terhadap Gus Dur sejak peristiwa pemecatan Menteri Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi. Intrik pemerintahan Gus Dur semakin memanas hingga pada akhirnya ia juga mewacanakan membangun hubungan diplomasi dengan Israel yang ditentang oleh para partai politik Islam. Singkatnya, akibat ketidakharmonisan Gus Dur, MPR, DPR, serta Wakil Presidennya ia mengeluarkan Dekrit yang berbunyi agar DPR dibubarkan, namun hal tersebut tidak terealisasi (Kuswanto, 2022).

Beralih dari Gus Dur ke Megawati, perempuan tersebut menjadi seorang sosok yang didambakan perempuan untuk menjadi pemimpin. Menurut Irmalinda dan Magriasti (2022) Megawati dinilai mampu menyelesaikan krisis multidimensional; mulai dari krisis ekonomi, politik, sosial, hingga lingkungan. Serta mampu meredam gejolak di antaranya persoalan etnis yang ada di Indonesia. Megawati dinilai sebagai sosok pemimpin simbolik karena ayahnya adalah seorang proklamator. Perebutan kekuasaan di awal masa reformasi juga dapat merupakan sebuah simbol ketidakefektifan sistem politik di Indonesia. Menurut Huntington (1995) perebutan kekuasaan merupakan suatu konsekuensi logis dalam arti yang tidak sampai menimbulkan korban jiwa di awal-awal masa reformasi.

Prosesi tersebut juga merupakan demokratisasi sesuai dengan tuntutan reformasi yang ada.

4.2.5 Susilo Bambang Yudhoyono: Kepemimpinan Kharismatik-Demokratis dan Stagnasi Politik-Demokrasi

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan pemerintahan pertama kali yang dipilih langsung oleh rakyat pada pemilu 2004. Dalam melihat fenomena tersebut, analisis akan ditujukan pada cara kepemimpinan SBY sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung pasca orde baru, serta meninjau pergulatan demokrasi elektoral dan partisipasi politik masyarakat. Dilihat dari perspektif masyarakat sipil, SBY merupakan seorang mantan prajurit yang menjadi presiden, setelah Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Kontras perbedaannya ialah dari cara keduanya mendapat kedudukan serta kekuasaan. Soeharto mendapatkan kekuasaan melalui upaya yang sistematis, melalui “kudeta merangkak”. Sedangkan SBY mendapatkan kekuasaan melalui kualifikasi kepemiluan dalam kontestasi demokrasi secara langsung (Suetha, Wahyudi, & Purnomo, 2021).

Selain dilihat dari perbedaan cara mendapatkan kekuasaan, analisis Soeharto dan SBY yang memiliki latar belakang militer dapat dilihat dari cara kepemimpinan politik dan cara membiarkan terjadinya sirkulasi elite kekuasaan. Soeharto dalam memimpin Indonesia pada periode orde baru menerapkan kepemimpinan militeristik dengan sifat otoritarianisme. Sedangkan SBY dianggap lebih mampu merangkul kelompok-kelompok sipil dan mengembangkan iklim demokrasi dengan semangat kepemimpinan politik yang bersifat kharismatik dan demokratis. Kepemimpinan kharismatik dan demokratis (*charismatic and democrat leadership*), menurut Wood (dalam Northouse, 2010) merupakan kepemimpinan yang melalui kekuatan pada kemampuan individunya. SBY dinilai dapat menyelesaikan segala persoalan dengan menggunakan kemampuan analisis individunya.

Dalam kepemimpinan politik SBY, terdapat beberapa dinamika penting mengenai demokrasi elektoral dan partisipasi politik masyarakat. Transisi demokratisasi di Indonesia membawa perubahan mendasar bagi sendi kehidupan sosial-politik masyarakat. Secara politis, SBY merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. Proses itu tidak terlepas dari gelombang demokrasi dunia yang menghasilkan gerakan sosial dan perubahan politik. Perubahan radikal dalam segi gerakan sosial menargetkan sebuah iklim politik yang dapat menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan sipil, serta terselenggaranya pemilu secara periodik. Fukuyama (1995) menjelaskan bahwa salah satu syarat negara demokratis ialah menentukan jalan kekuasaan secara langsung lewat sirkulasi kepemimpinan yang ditentukan oleh rakyat sendiri. Dalam hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Indonesia telah menjadi negara demokratis sejak 2004 (Horowitz, 2014).

Pemilihan umum atau yang dapat disebut sebagai demokrasi elektoral menghasilkan kepemimpinan politik yang kuat. Hal itu disebabkan karena legitimasi masyarakat tidak dapat diganggu gugat keabsahannya. Di lain sisi, kepemimpinan kharismatik dan demokratis SBY dinilai oleh banyak ahli membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil, stabilitas politik terjaga, serta tidak sering menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Meskipun banyak capaian-capaian yang memberikan dampak signifikan secara makro bagi ekonomi, namun dalam segi politik-kebijakan di bidang demokrasi mengalami stagnasi. Tomsa (2010) menjelaskan bahwa stagnasi politik-kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gagalnya penuntasan kasus HAM Munir, kecacatan penyelenggaraan Pemilu 2009—banyaknya kasus pemilih fiktif hingga tidak transparannya proses pemilihan-, hingga okupasi modal dalam bentuk *money politics*.

Di tangan stagnasi politik-demokrasi di masa SBY, ada beberapa hal pula yang patut dicatat sebagai pencapaian penting demokrasi pasca orde baru. Catatan tersebut di antaranya, ialah: perkembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wadah untuk pencegahan korupsi,

meminimalisasi kontroversi saat mengesahkan sebuah kebijakan, hingga SBY pernah mendapatkan tingkat kepuasan kinerja tertinggi oleh masyarakat pada tahun 2009. Namun, perlu menjadi catatan kembali bahwa demokrasi elektoral yang dibarengi dengan sifat kepemimpinan kharismatik-demokratis tidak serta-merta menghasilkan konfigurasi sistem politik yang ideal. Diperlukan sebuah alternatif-alternatif pengembangan model demokrasi agar aspirasi masyarakat dapat terakomodir secara bernas, dan menjadi konsiderasi pelaksanaan demokrasi substansial.

4.2.6 Joko Widodo: Kepemimpinan Transformasional dan Regresi Demokrasi

Setelah dua periode kepemimpinan politik SBY, Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden yang sering diasosiasikan pemimpin dari "*wong cilik*" atau masyarakat marjinal di Indonesia. Dalam membuat branding diri atas kepemimpinan politiknya, Jokowi menerapkan skema kepemimpinan transformasional untuk memberikan kesan yang mendalam untuk masyarakat. Menurut Robbins & Coulter (2012), kepemimpinan transformasional ialah cara seorang pemimpin dalam mendorong serta memberikan motivasi—mengubah- pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa. Kepemimpinan ini melebihi kepemimpinan karismatik. Karena memperhatikan kebutuhan, kepedulian, hingga perkembangan tingkat individu, serta mampu membangkitkan dan mengilhami pengikutnya untuk melakukan usaha ekstra dalam mencapai suatu tujuan.

Namun, seiring berjalannya pemerintahan Jokowi yang menggunakan skema kepemimpinan politik transformasional, hal tersebut semakin lama mengalami kemunduran terlihat dari konfigurasi politik-kebijakan yang ada. Menurut Aspinall & Berenschot (2019) ada beberapa hal yang menjadi kunci penting kemunduran kepemimpinan politik Jokowi dan politik-kebijakannya, di antaranya: otonomi daerah yang menciptakan klientelisme, kartelisasi politik, serta kebebasan sipil yang terancam. Utamanya tiga hal tersebut membuat iklim

demokratisasi di Indonesia mengalami kemunduran secara signifikan, setelah mengalami stagnasi di masa-masa SBY.

Tesis Aspinall & Berenschot (2019) mengenai kunci penting kemunduran kepemimpinan politik Jokowi dan politik-kebijakan di Indonesia, pernah disinggung oleh Ambardi (2009) sebagai akibat keleluasaan partai-partai politik menentukan jalan politik-kebijakan para pemimpin negara. Partai politik hanya memiliki persaingan ketika ada dalam tataran kontestasi politik, namun setelah masuk dalam badan legislatif ataupun pemerintahan partai-partai tersebut memiliki jalinan relasional yang erat. Reformasi membawa proliferasi partai-partai politik untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Namun, satu sisi kelemahan dari hal tersebut adalah tidak adanya oposisi atau lawan politik yang jelas untuk mendirikan prinsip demokrasi, yaitu *checks and balances*. Padahal, berdasarkan konsepsi *Poliarkhi*, Dahl menjelaskan bahwa sistem demokrasi dan kepemimpinan politik yang ideal ialah dengan tidak menegasikan oposisi pemerintahan.

Kemunduran demokrasi atau regresi demokrasi pada era Jokowi dapat dilihat sejak Pemilu 2014 dan terbentuknya pemerintahan Jokowi. Pemilu 2014 menjadi salah satu penguatan elite politik dan elite-oligark dalam melanggengkan kekuasaannya. Power & Warburton (2020) menjelaskan bahwa terbentuknya pemerintahan Jokowi berdasar atas "*powerfulness coalition force*", tanpa sedikit celah pun untuk oposisi dalam mengembangkan pola ataupun skema mengimbangi kekuasaan.

Disamping itu, ancaman deliberasi publik dan kebebasan sipil juga menguat sebagai salah satu faktor menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari diterbitkannya revisi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker). Produk UU tersebut tidak dihasilkan lewat deliberasi publik, namun diciptakan melalui geliat skema oligarki yang mengutamakan kepentingan bisnis-negara. Macetnya jarring-jaring komunikasi politik yang ada disebabkan oleh dua hal;

pertama, kecenderungan ruang Indonesia pasca orde baru banyak mengalami “pesanan regulasi” yang diajukan lewat “orang-orang titipan”. Kedua, gagalnya partai politik menjadi wadah representasi massa disebabkan adanya transaksi kepemiluan sebelum terpilihnya para wakil-wakil partai, sehingga partai politik tidak memiliki gairah untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat (Power & Warburton, 2020); (Mietzner, 2021).

Terjadi skema-skema penolakan yang dilakukan oleh elemen masyarakat-warga terhadap aturan-aturan tersebut. Demonstrasi sebagai alternatif deliberasi publik dan penyampaian aspirasi politik dilakukan secara massif dengan menggalang seluruh kekuatan kelompok-kelompok progresif untuk menghentikan praktek-praktek monopoli regulasi. Elemen masyarakat-warga meminta diadakannya revisi UU ITE dan menolak pelemahan KPK secara berkala. Namun, kebebasan menyampaikan aspirasi politik di ruang publik politis mendapatkan tindakan represif dari aparat negara. Berdasarkan catatan KontraS (2020) selama setahun terakhir (2019-2020), penyusutan diskursivitas ruang publik terjadi lewat 157 peristiwa, yang diantaranya 4 peristiwa (hak asosiasi), 93 peristiwa (hak berkumpul), dan 60 peristiwa (hak berekspresi). Penyusutan ruang publik ini merupakan salah satu karakter negara dalam melakukan hegemoni dan teror untuk membungkam opini publik yang berbentuk aspirasi. Penyusutan ruang publik diantaranya; tindakan represif pada aksi massa bertajuk “Reformasi Dikorupsi” (2019) dan “Mosi Tidak Percaya” (2020) yang memberikan afirmasi bahwa negara menolak aspirasi publik dan partisipasi politik rakyat.

Dari fenomena-fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional Jokowi belum mampu memberikan efek yang signifikan bagi perkembangan politik-kebijakan, khususnya dalam hal demokrasi. Nyatanya, dalam kurun waktu Sembilan tahun terakhir hingga akhir masa jabatan, Jokowi membawa Indonesia ke arah regresi atau kemunduran demokrasi dengan politik-kebijakan yang tidak transparan seperti studi kasus di atas. Kenyataan ini memperlihatkan ketidakberdayaan Jokowi dalam melawan

elite-oligarki dan cenderung mengorbankan hak-hak warga negara (Fauzi, 2019). Demokrasi yang seharusnya menjadi instrument aktif dalam kehidupan bernegara, berubah menjadi instrument pasif yang diabaikan oleh negara sendiri.

4.3 Penutup dan Simpulan

Kepemimpinan dalam tiap masa memiliki corak serta definisi yang berbeda-beda, tergantung dari mana sudut pandang tersebut diambil. Dalam tulisan kali ini, penulis setidaknya membedah hasil akhir sifat kepemimpinan masing-masing presiden Indonesia dari Sukarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi bersama intrik-intrik politik yang pernah dialaminya. Sirkulasi elite, peran tangan-tangan tidak terlihat dalam pemerintahan (Re: Oligarki atau Musuh Politik), hingga klientelisme menjadi persoalan dan tantangan politik-kebijakan modern yang harus dituntaskan oleh pemerintahan sekarang dan yang akan datang.

Akhirnya kita akan mengenali, bahwa Sukarno memiliki asosiasi keterhubungan dengan *"The Great Man Theory"* atau kepemimpinan politik 'orang besar' yang kharismatik. Soeharto mendapatkan kekuasaan setelah menggulingkan Sukarno, lantas asosiasi kepemimpinan politiknya mengarah pada otoritarianisme. Tumbangnya Soeharto membawa angin besar perubahan bagi sistem politik Indonesia "reformasi" di masa Habibie. Naiknya Gus Dur ke puncak kekuasaan sebagai pemimpin yang moralis, juga tidak dapat menyelematkannya dari kudeta di tahun keduanya sebagai presiden. Lalu, digantikan oleh Megawati yang memiliki sifat kepemimpinan simbolik akibat konsekuensi logis persona sang ayah, yaitu Sukarno. Demokratisasi membuat SBY—kepemimpinan kharismatik-demokrat- menjadi presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme Pemilu langsung, namun efeknya ialah pada stagnasi demokrasi. Dan yang terakhir ialah kepemimpinan transformasional Jokowi yang belum mampu mengentaskan persoalan-persoalan kebangsaan, malahan memberikan dampak bagi menurunnya performa demokrasi (regresi) di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Nietzsche, F. W. (2019). *The Will to Power: Kekuasaan dan Hasrat yang Melampaui Kemampuan Diri Sendiri*. Yogyakarta: Narasi.
- Suseno, F. M. (2015). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Thoha, M. (1983). *Kepemimpinan dan Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Horowitz, D. L. (2014). *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adams, C. (1965). *Sukarno an Autobiographyas Told to Cindy Adams*. New York: The Bobbs-Merril Inc.
- Feith, H. (1988). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Mortimer, R. (2006). *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965*. Sheffield: Equinox Publishing.
- Sundhaussen, U. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967 (Menuju Dwifungsi ABRI)*. Jakarta: LP3ES.
- Tim Tempo. (2016). *Gie: dan Surat-Surat yang Tersembunyi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Muzzaqi, F. (2019). *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Henriques, E., & Dwifatma, A. (2015). Fungsi Politik Ruang Publik pada Masa Orde Baru, Reformasi, Hingga Era Digital. *Jurnal Interact*, 4(1), 1-10.
- Uhlin, A. (1997). *Indonesia and the "Third Wave of Democratization", the Indonesian Pro-Democracy Movement in Changing World*. Padstow: Curzon Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions, and Society*. Pasir Panjang: Institute of Southeast Asian Studies.
- Habibie, B. J. (2006). *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia menuju Demokrasi*. Jakarta: The Habibie Center.

- Northouse, P. (2010). *Leadership: Theory and Practice*. Boston: Boston.
- Singh, B. (2000). *Habibie dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Suetha, D. A., Wahyudi, A., & Purnomo, B. (2021). Menganalisis Perjuangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Merawat Demokrasi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, 4(1), 31-42.
- Fukuyama, F. (1995). *The End of History and the Last Man*. Yogyakarta: CV. Qalam.
- Tomsa, D. (2010). Indonesia Politics in 2010: The Perils of Stagnation. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, 46(3), 309-328.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). *Management*. London: Pearson Education Limited.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer.
- Fauzi, G. (2019). *Aturan Kontroversial di Jalan Reformasi*. Jakarta: CNN Indonesia.
- Naim, A. (2014). Tipologi Kepemimpinan Gus Dur. *Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, 6(1), 1-20.
- Irmalinda, Z. P., & Magriasti, L. (2022). Kepemimpinan Kepala Negara Perempuan: Studi Komparatif antara Indonesia dan Selandia Baru. *Jurnal Ilimiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 71-76.
- Utama, V. R. (2019). *Menjerat Gusdur*. Jakarta: NU Media Online.
- Kuswanto. (2022). Transisi Kekuasaan dari Abdurrahman Wahid ke Megawati: Sebuah Cara Pandang Berbeda. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 127-142.
- Huntington, S. (1995). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti.

BAB 5

KEBIJAKAN PUBLIK

Oleh Joko Tri Nugraha, Sri Mulyani

5.1 Pendahuluan

Kebijakan publik, sebagai disiplin ilmu, mungkin masih terasa asing bagi orang Indonesia. Ini karena ilmu kebijakan publik baru-baru ini diajarkan sebagai kursus khusus di negara kita. Sebelum ini, para sarjana politik mempelajari kebijakan publik sebagai subtopik bahasan. Menurut Islamy (1994), kebijakan publik adalah salah satu bagian dari proses ilmu pemerintahan.

Dewasa ini, kebijakan publik telah menarik perhatian semakin banyak orang, terutama setelah banyak orang yang menentang paham yang dikenal sebagai "dikotomi administrasi-politik". Menurut Islamy (1997), disiplin ini adalah studi kebijakan publik yang menggabungkan elemen ilmu politik dan administrasi negara.

Seiring waktu, para ilmuwan politik semakin tertarik pada penelitian kebijakan publik. Fenomena ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penelitian mengenai kebijakan publik, yang dilakukan baik melalui penelitian berkala maupun literatur yang membahas kebijakan publik secara khusus (Lester dan Stewart, 2000).

Pusat studi yang ada di universitas negeri dan swasta yang berfokus pada studi kebijakan publik juga menunjukkan fenomena yang lain. Tentu saja, ada banyak penjelasan yang dapat diberikan untuk fenomena ini. Ada tiga jenis alasan: ilmiah, profesional, dan politis (Winarno, 2016).

Sebaliknya, transformasi kontemporer yang disebabkan oleh revolusi teknologi komunikasi dan globalisasi global telah membuat penelitian kebijakan publik semakin menarik. Pertama, sebagian besar negara berkembang, yang pada awalnya merupakan negara-negara otoriter, telah memulai

proses demokratisasi sebagai akibat dari globalisasi dan revolusi teknologi dan komunikasi. Kondisi ini mendorong partisipasi aktor baru atau aktor transnasional seperti perusahaan multinasional dan lembaga pemerintahan global seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO dalam pembuatan kebijakan publik. Akibatnya, perumusan kebijakan kini melibatkan lebih banyak aktor, termasuk warga negara dan kelompok-kelompok kepentingan, dan tidak lagi didominasi oleh elit politik yang tidak dapat dikritik.

Oleh karena itu, pemerintah dihadapkan pada berbagai tuntutan. Kedua, masyarakat yang semakin kritis, aktif, dan kreatif telah muncul sebagai akibat dari globalisasi informasi. Akibatnya, warga negara saat ini semakin peduli dengan kebijakan publik yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan pribadi warga negara dalam semua aspek kehidupan mereka. Akibatnya, pemerintah harus semakin responsif, akomodatif, dan akuntabel sekaligus juga transparan.

Untuk kasus Indonesia, wacana tentang demokrasi dan reformasi yang tidak menentu sejak kejatuhan rezim Soeharto telah memengaruhi proses politik. Sementara kebijakan publik sebelumnya dikritik, kebijakan baru dibuat untuk menyelesaikan masalah masyarakat Indonesia saat ini. Beberapa kebijakan baru yang dibuat pemerintah tersebut mendapat dukungan, tetapi beberapa di antaranya menimbulkan kontroversi dan menimbulkan resistensi di kalangan pejabat dan kelompok masyarakat. Kebijakan publik yang berkaitan dengan restrukturisasi perbankan adalah salah satu contohnya.

Studi kebijakan publik di Indonesia menjadi semakin penting dan menarik karena wacana otonomi daerah yang sedang berlangsung saat ini. Meskipun sebagian besar masyarakat diharapkan akan hidup lebih baik setelah daerah tersebut diberi otonomi, banyak orang khawatir. Jika otonomi wilayah diperhatikan, hanya akan muncul kerajaan kecil yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, studi kebijakan publik di Indonesia diharapkan dapat

memberikan saran untuk perbaikan kebijakan publik di masa depan.

Seperti yang dinyatakan oleh Santoso (1993), para ilmuwan politik di Indonesia belum memberikan perhatian yang cukup pada bidang kajian kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan situasi Indonesia. Mereka telah menetapkan bidang kajian ini sebagai salah satu dari banyak bidang ilmu politik, tetapi sebagian besar ilmuwan politik di Indonesia lebih memfokuskan pada bidang ilmiah politik umum.

Santoso (1993) menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa minat ilmuwan politik untuk menyelidiki kebijakan publik telah berkurang. Pertama, ada asumsi bahwa evaluasi kebijakan publik termasuk dalam bidang ilmu administrasi negara dan bukan ilmu politik. Kedua, tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan publik dapat menyajikan analisis dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang merupakan kebutuhan politik. Misalnya, penelitian Purwanto (1997) mencoba memahami konteks politik proses lahirnya kebijakan publik melalui analisis kebijakan otomotif Indonesia tahun 1996-1997. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan otomotif tersebut terperangkap dalam berbagai kepentingan. Pada akhirnya, orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kebijakan publik terlibat dalam sistem *patron-client* yang muncul di masa orde baru.

5.2 Pengertian Kebijakan Publik

Beberapa orang menggunakan kata "kebijakan" sebagai terjemahan dari kata Inggris "policy". Suatu pendapat yang harus kita hargai karena mencakup upaya untuk mengindonesiakan istilah asing yang belum tentu cocok dan benar. Menerjemahkan istilah, terutama dari bahasa asing, juga merupakan tugas yang sulit. Selain itu, kata "kebijakan" dapat berarti "kebijaksanaan", yang berbeda dari "wisdom", yang berarti "kebijaksanaan." Sementara kebijakan mencakup peraturan yang sudah ada, kebijaksanaan membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. Selain itu, kita tidak dapat

membedakan kata "politik" dari "politik" karena pembuatan kebijakan pada dasarnya adalah proses politik.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, berikut adalah beberapa ahli kebijakan yang memberikan definisi. Lasswell dan Kaplan (1979) menggambarkan kebijakan sebagai "suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah". Friedrich (1963) menggambarkan kebijakan sebagai "serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu" Anderson (1979).

Seperti yang dinyatakan oleh Lasswell dan Kaplan (1979), kedua pakar ini dengan jelas menekankan bahwa kebijakan itu terdiri dari suatu program tindakan yang mengandung nilai-nilai tertentu. Singkatnya, kebijakan sama dengan program yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Friedrich (1963) lebih menunjukkan dari mana usul kebijakan itu berasal, yaitu bisa dari individu, kelompok, atau pemerintah. Selain itu, kebijakan itu sudah mencakup tantangan dan kemudahan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Anderson (1979) juga mendefinisikan kebijakan sebagai penetapan program oleh satu atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan masalah tertentu. Definisinya hampir sama dengan kedua pendapat di atas. Mac Rae dan Wilde (1979) menekankan pengaruh kebijakan terhadap banyak orang; dengan kata lain, kebijakan memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi banyak orang, dan jika pengaruh kebijakan hanya tertuju pada satu atau sejumlah kecil orang, sulit untuk disebut sebagai kebijakan.

Dengan mempertimbangkan pendapat para pakar di atas, kita dapat mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu program tindakan yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan dan mempengaruhi sejumlah besar orang untuk mencegah suatu tujuan tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menghadapi banyak masalah yang rumit karena krisis dalam negeri yang kompleks, krisis keuangan, dan pelambatan pertumbuhan ekonomi global. Tentu

saja, situasi ini membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan yang cepat dan akurat agar pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah yang rumit dan berat ini. Pada akhirnya, keadaan ini mengharuskan pemerintah dan lembaga tinggi lainnya untuk membuat keputusan kebijakan yang sulit. Kebijakan yang dibuat kadang-kadang membantu pemerintah dan rakyat Indonesia keluar dari krisis, tetapi kadang-kadang mereka juga dapat menghancurkan pemerintah itu sendiri.

Oleh karena itu, kita tidak dapat lepas dari kebijakan publik dalam kehidupan kontemporer seperti saat ini. Ada banyak kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*), kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan internasional, pendidikan nasional, ketahanan pangan (*food security*), ketahanan energi (*energy security*), transportasi (darat, laut, dan udara), lingkungan hidup, dan sebagainya. Beberapa kebijakan ini berhasil, tetapi banyak juga yang gagal.

Secara sosiologis, kita tidak boleh menyamakannya dengan masyarakat karena kata publik memiliki banyak arti. Masyarakat dilihat sebagai sistem hubungan sosial di mana orang hidup dan tinggal bersama. Masyarakat memiliki norma dan nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan anggota-anggotanya. Di sisi lain, publik adalah kumpulan orang yang memiliki perhatian, minat, atau kepentingan yang sama. Tidak ada norma atau nilai yang mengikat atau membatasi perilaku publik seperti halnya masyarakat karena publik sulit diidentifikasi secara jelas. Mereka memiliki minat atau minat yang sama, yang merupakan hal yang menonjol. Dalam ilmu hubungan masyarakat, kita tahu banyak definisi publik, seperti penggemar rokok cap kancil, penggemar musik Rhoma Irama, penggemar bunga anggrek, dan sebagainya (Islamy, 1994).

Selain itu, kita sering mengalami kesulitan menerjemahkan kata publik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, opini publik berarti pendapat umum, *public relation* berarti hubungan masyarakat, dan *public health* berarti kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, rumah sakit umum dan perpustakaan publik berarti rumah sakit umum, dan administrasi publik berarti administrasi negara.

Berikut ini adalah pendapat pakar untuk memperjelas pengertian kebijakan publik:

1. Mac Rae dan Wilde (1979) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh besar terhadap sejumlah besar orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang dipilih oleh pemerintah, dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang. Salah satu contohnya adalah keputusan seorang rektor universitas. Oleh karena itu, kebijakan itu harus mencakup banyak kegiatan dan mempengaruhi banyak orang.
2. Dye (1978); Dewi (2017) memberikan definisi kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah apa pun. Menurut Dye (1978), ketika pemerintah memilih atau memilih untuk melakukan sesuatu, harus ada tujuan untuk melakukannya, dan kebijakan negara harus mencakup semua tindakan pemerintah. Ini berarti bahwa itu bukan hanya pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja, dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan negara harus mencakup semua tindakan pemerintah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak melakukan sesuatu oleh pemerintah akan memiliki efek yang sama besarnya dengan melakukan sesuatu oleh pemerintah.

Kasus berikut menunjukkan definisi kedua yang disebutkan di atas:

Pemerintah Kota Magelang telah menertibkan semua pengemis dan orang tanpa rumah yang berkeliaran di tengah kota. Jika Pemerintah Kota Magelang membiarkan pengemis dan gelandangan memasuki kota, itu menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan kebijakan yang tepat untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan. Jika mereka membiarkan mereka memasuki kota, itu menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan kebijakan yang penting.

3. Anderson (1979a) menggambarkan kebijakan negara sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Sudah jelas bahwa definisi kebijakan

dapat diperluas sebagaimana didefinisikan Anderson (1979a) di atas. Menurut Anderson, setiap kebijakan yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah disebut kebijakan negara. Oleh karena itu, kebijakan negara tidak hanya dibuat oleh lembaga atau badan negara tertinggi, seperti Presiden dan MPR, tetapi juga oleh pejabat di semua jenjang pemerintahan. Contohnya, Undang-Undang Dasar (UUD) adalah kebijakan publik yang ditetapkan oleh lembaga tertinggi negara, sedangkan peraturan daerah adalah kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah di daerah tertentu, seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Selain itu, tindakan, pidato, dan pernyataan kebijakan pejabat negara juga dapat dianggap sebagai kebijakan publik.

4. Easton (1953); Dewi (2017) menyatakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai memberikan nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh masyarakat, yang berarti bahwa hanya pemerintahlah yang memiliki otoritas sah untuk memaksakan sesuatu, yaitu nilai-nilai kebijaksanaan, kepada seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah bertindak sebagai penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah kehidupan sehari-hari rakyat, yang merupakan tugas dan fungsinya. Untuk ilustrasi, pemerintah dapat menetapkan pajak impor, atau bea masuk, atas barang yang diimpor dari negara lain ke dalam negeri. Dalam contoh lain, pemerintah dapat menghukum atau mengusir individu asing yang bekerja di Indonesia tanpa ijin kerja.

Menurut keempat pendapat pakar tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih dan diberikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk tujuan tertentu demi kepentingan umum. Definisi-definisi ini berdampak pada hal-hal berikut:

1. Pilihan pemerintah tentang apa yang harus dilakukan adalah kebijakan publik.

2. Tindakan pemerintah itu mengikat seluruh masyarakat karena diberikan kepada mereka oleh pemerintah.
3. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan khusus.
4. Kepentingan publik selalu menjadi fokus tindakan pemerintah.

5.3 Kebijakan dan Kepentingan Publik

Pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa kebijakan publik hanya dapat disebut sebagai kebijakan publik jika tujuannya adalah untuk kepentingan publik. Meskipun kebijakan dibuat oleh pemerintah atau negara, kepentingan publik selalu menjadi penggerakannya. Hal ini disebabkan oleh gagasan demokrasi kontemporer bahwa kebijakan publik tidak hanya berisi pendapat dan pendapat para pejabat yang mewakili rakyat; opini publik juga memiliki posisi yang sama dengan opini pejabat untuk dimasukkan ke dalam kebijakan publik.

Akhir-akhir ini, kita melihat fenomena yang meningkatnya kesadaran politik di mana-mana, termasuk di negara kita sendiri. Semakin banyak orang yang terlibat dalam partisipasi politik adalah contoh dari hal ini. Selain itu, orang-orang di masyarakat sangat selektif di berbagai bidang karena kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta derasnya jalur komunikasi yang sampai ke pelosok-pelosok. Bagian dari politik.

Misalnya, tidak hanya menjadi lebih mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan politiknya, tetapi mereka juga menentukan sikap politik yang jelas terhadap kebijakan publik. Mereka dapat menerima, yang berarti mereka akan terlibat dalam politik, atau menolak, yang berarti mereka tidak akan terlibat. Dengan melihat apakah kebijakan saat ini telah memenuhi kebutuhan mereka atau tidak, mereka dapat dengan jelas menentukan apakah mereka akan berpartisipasi atau tidak.

Peranan yang dimainkan oleh publik dalam menjalankan kebijakan sebanding dengan seberapa jauh kebijakan tersebut dirasakan menyentuh kepentingan publik. Di sini terlihat

bagaimana orang-orang di lapisan bawah dan mereka yang membuat kebijakan bergantung satu sama lain. Masyarakat lapisan bawah harus berkolaborasi dengan lapisan atas dalam proses perumusan kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingannya; namun, lapisan atas tidak dapat menggunakan kekuatan legitimasinya untuk memaksakan kepentingannya begitu saja kepada masyarakat. Dengan demikian, apa sebenarnya arti kepentingan publik? Banyak orang masih mempertanyakan teori kepentingan publik, dan memberikan definisi yang jelas tentang apa itu kepentingan publik ternyata tidak mudah.

Menurut Islamy (1994), apa pun yang dianggap penting oleh publik dianggap sebagai kepentingan publik dapat dianggap sebagai kepentingan publik. Namun, yang mana yang dianggap penting bagi masyarakat? Anggota publik mungkin memiliki kepentingan yang berbeda. Apakah kepentingan publik menjadi hasil dari kombinasi dari kepentingan-kepentingan itu? Selain itu, apakah pembuat kebijakan dapat dianggap bertanggung jawab atas hal-hal yang dianggap sebagai kepentingan publik jika publik atau rakyat tidak menyadari atau tidak mampu menerjemahkan kepentingannya? Kenyataan ini sering terjadi, terutama di negara-negara berkembang, di mana pejabat pemerintahlah yang menentukan kepentingan publik. Contoh yang paling umum adalah perencanaan pembangunan dari atas ke bawah, atau perencanaan dari atas ke bawah, di mana warga hanya dapat memilih untuk atau tidak mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dari atas.

Para sarjana administrasi negara telah berbicara secara luas tentang cara-cara baru untuk mendefinisikan apa yang dimaksudkan publik dalam administrasi publik dan politik publik. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, istilah "publik" memiliki makna yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini karena organisasi publik, seperti negara atau pemerintah, harus aktif bekerja untuk memberikan layanan publik yang sebaik mungkin. Penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan, dan korupsi lainnya dapat menyebabkan masyarakat tidak percaya pada organisasi publik dan membuat mereka tidak percaya lagi pada mereka untuk berpartisipasi politik.

Administrator publik berbeda dengan administrator lain karena mereka semata-mata bekerja untuk kepentingan rakyat (publik). Mereka disebut administrator publik karena mereka memiliki peranan dan kewajiban khusus, yaitu peranan dan kewajiban publik. Dengan demikian, administrator publik harus sensitif dan fokus pada kepentingan publik.

5.4 Kategori Administrator Publik

George F. Goerl (1980), seorang profesor administrasi negara, telah memberikan penjelasan yang menarik tentang tiga kategori perbedaan antara administrator publik:

1. **Administrator Publik Sebagai Birokrat**
Mempunyai ciri-ciri sebagai pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh atasan politiknya (atasan sebagai perumus kebijakan). Akibatnya, ia tidak memiliki peran politik; sebaliknya, ia hanya memiliki peran pelaksana, yang memiliki tanggung jawab administratif. Dengan kata lain, ia hanya bertindak sebagai pelaksana kepentingan publik, bukan hanya berpartisipasi dalam menerjemahkan atau menciptakan kepentingan publik.
2. **Administrator Publik Sebagai Pemain Politik**
Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berusaha menciptakan kepentingan publik berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan selalu memperhatikan orang yang tidak memilikinya. Ia terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dan selalu digerakkan oleh kepentingan publik ketika ia berpartisipasi dalam peran politik.
3. **Administrator Publik Sebagai Profesional**
Ini menunjukkan bahwa ia memiliki keahlian teknis dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai spesialis dan selalu berfokus pada memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sesuai dengan profesionalismenya, administrator publik bertindak dan menetapkan kebijakan publik yang berfokus pada kepentingan publik. Peran profesional mereka mencerminkan bagaimana administrator publik benar-benar bertindak sebagai abdi

masyarakat, atau public servant, dan selalu bekerja untuk kepentingan publik berdasarkan etika profesionalnya.

Rakyat selalu mengharapkan administrator publik memberikan layanan terbaik yang dapat mereka berikan. Agar ia dapat memenuhi peran profesionalnya (politik dan instrumental) dengan sebaik mungkin, ia harus memiliki semangat kepublikan dan juga memiliki tanggung jawab administratif dan politis. Selain itu, karena administrator publik bekerja pada organisasi publik, organisasi publik harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kepentingan publik. Fokus utama organisasi publik adalah memberikan layanan publik, sedangkan tujuan utama organisasi non publik adalah mencari untung. Ini membedakan organisasi publik dari organisasi non publik. Selain itu, organisasi publik tidak menyadari persaingan pasar, berbeda dengan organisasi non publik yang selalu memenangkan persaingan.

Suatu contoh, jika kita ingin mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kita harus mengunjungi RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Disdukcapil. Anda harus pergi ke kantor-kantor ini dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan KTP, yang dibuat dalam format standar. Kita tidak dapat membeli KTP tersebut di toko atau perusahaan percetakan. Namun, perusahaan tersebut menawarkan KTP dengan format yang lebih baik dengan persyaratan yang lebih sederhana dan layanan yang serba cepat. Oleh karena itu, sebagai entitas publik, kelurahan dan kecamatan harus dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

5.5 Policy Cycle

Menurut penelitian (Suharto, 2005; Dewi, 2017), siklus kebijakan dapat didefinisikan sebagai kombinasi antara analisis kebijakan dan proses kebijakan. Siklus ini kemudian menghasilkan pembentukan sistem kebijakan publik. Dalam lingkaran politik itu, ada beberapa langkah yang harus

dilakukan, seperti identifikasi masalah, legitimasi (perumusan), implementasi (penerapan), dan evaluasi.

Pemerintah diminta untuk mengambil tindakan yang tepat dan sesuai untuk memecahkan masalah pada tahap pertama, yaitu identifikasi masalah. Salah satu cara untuk memahami masalah publik adalah sebagai kebutuhan atau ketidakpuasan masyarakat untuk mencari cara untuk menanganinya. Baik orang-orang yang terkena langsung oleh masalah itu maupun orang-orang yang bertanggung jawab atas masalah itu harus melakukannya. Pemerintah pasti tidak akan dapat menyelesaikan semua masalah yang sedang dihadapi karena masalah yang ada dalam masyarakat sangat beragam.

Proses legitimasi adalah tahap berikutnya. Proses ini mencakup berbagai tindakan yang berkaitan dengan pilihan, seperti mengidentifikasi pilihan, membuat pilihan, menilai pilihan yang tersedia, dan akhirnya memilih pilihan terbaik. Selama proses ini, membuat pilihan harus objektif dan subjektif. Subjektif berarti alternatif yang dipilih memengaruhi perasaan pembuat kebijakan dan masyarakat, sedangkan objektif berarti alternatif yang dipilih dapat berdampak positif secara keseluruhan. Pada akhirnya, alternatif yang dipilih dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pada saat perumusan telah dibuat, tahap berikutnya adalah melaksanakan kebijakan di lapangan. Seperti yang ditekankan dalam proses legitimasi, pelaksanaan kebijakan adalah kegiatan konseptual dan praktis. Selama penerapan kebijakan, diperlukan pengawasan dan pengendalian. Hal ini mengingatkan para pelaksana kebijakan pada tingkat bawah bahwa mereka sering mengalami kesulitan dengan apa-apa yang menjadi keputusan yang diberikan oleh tingkat atas. Ini karena kebijakan yang dikeluarkan seringkali tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Ada kemungkinan bahwa ini terjadi karena pelaksana tidak memahami secara menyeluruh kebijakan yang dikeluarkan, sehingga mereka terjebak dalam hal kepentingan organisasi atau bahkan kepentingan pribadi.

Pelaksanaan kebijakan akan menjadi proses yang rumit dan mungkin dianggap sebagai permulaan baru dari seluruh proses kebijakan, meskipun fokusnya pada kepentingan

organisasi dan individu. Untuk mengatasi hal ini, pelaksana kebijakan harus diberikan komunikasi yang jelas, tepat, dan konsisten tentang isi kebijakan. Jika informasi yang jelas, akurat, dan konsisten tentang kebijakan ini tersedia, diharapkan ini akan membantu anggota staf melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Pada tahap terakhir, evaluasi kebijakan, sangat penting. Ini akan membantu para pembuat kebijakan selanjutnya membuat kebijakan lebih baik dengan mengevaluasi hasil positif dan negatif dari pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Proses ini harus bersifat evaluatif, empiris, dan normatif. Jenis informasi evaluatif karena mereka menekankan makna atau nilai suatu kebijakan dan apakah itu moral atau tidak. Normatif adalah jenis informasi yang mendukung atau memberikan petunjuk yang berorientasi ke masa depan. Oleh karena itu, diharapkan mereka dapat menyarankan cara-cara untuk memecahkan masalah publik.

5.6 Penutup

Ada dua cara umum untuk melihat kebijakan publik. Yang pertama adalah dari sudut pandang analisis dan evaluasi kebijakan; yang kedua adalah dari sudut pandang proses kebijakan. Analisis kebijakan dan analisis evaluasi adalah komponen dari sudut pandang pertama ini. Analisis kebijakan diharapkan akan menemukan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan. Hanya dapat dipisahkan. Namun, evaluasi kebijakan memberikan penilaian atas masalah yang terkait dengan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan diterapkan dari sudut pandang kesesuaian, kesesuaian, dan efektivitas. Perspektif kedua mencakup alur kerja kebijakan dengan fokus pada perumusan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan. Selain itu, sebagai suatu proses kebijakan publik, terdiri dari beberapa tahap, seperti identifikasi masalah, legitimasi (perumusan), implementasi (penerapan), dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1979a. *Cases in Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Anderson, James E. 1979b. *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nd edition.
- Dewi, Rosmala. 2017) Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 5 (1), hal. 6-12
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*, New Jersey, Prentice Hall Inc.
- Easton, David. 1953. *The Political System*, New York, Pnof.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*, New York: Mc. Graw Hill.
- Goerl, George F. 1980. *In Search of The Public Administrator; Public Administrator and Public Servants and Public Agents*, Paper Untuk Konferensi ASPA, San Fransisco.
- Islamy, Irfan. 1994. *Kebijakan Publik*, Modul Pembelajaran, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Lasswell, Harold D. Dan Abraham Kaplan. 1979. *Power and Society for Public Decisions*, Belmont, Calif: Wadworth, Inc.
- Lester, James. P and Joseph Stewart. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*, Second Edition, Australia: Wadsworth.
- Mac Rae, D. Dan James E. Wilde. 1979. *Policy Analysis for Public Decisions*, Massachussetts: Duxbury Press.
- Purwanto, Agus Erwan. 1997. *Kebijakan Otomotif di Indonesia 1996-1997: Memahami Konteks Politik Proses Lahirnya Kebijakan Publik*, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, Vol. 1, No. 2 (Juli 1997).
- Santoso, Amir. 1993. *Analisis Kebijaksanaan Publik: Suatu Pengantar*, *Jurnal Ilmu Politik* No. 3, Jakarta: Gramedia.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik di Era Globalisasi*,
Yogyakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*).

BAB 6

KASUS-KASUS KOMUNIKASI POLITIK

Oleh M. Nur Rofiq Addiansyah

6.1 Pendahuluan

Pada bagian ini, penulis ingin menunjukkan berbagai kasus -kasus komunikasi politik kekinian yang terjadi di Indonesia, baik yang terjadi di tingkat lokal atau tingkat nasional. Ditingkat lokal ini dapat kita maknasi sebagai, adanya fenomena-fenomena komunikasi politik yang dilakukan oleh sosok atau lembaga yang lokus kejadiannya ada ditingkat lokal. Sedangkan di tingkat nasional, ketika fenomena atau kejadian proses komunikasi politik itu terjadi ditingkat nasional. Komunikasi politik sendiri dapat dimaknasi sebagai proses interaksi antara pengirim pesan dengan penerima pesan dalam konteks politik. Dalam penjelasan lain, komunikasi politik dapat dimaknasi sebagai. Komunikasi politik merupakan bagian dari cabang Ilmu Komunikasi yang sangat populer. Pun saat-saat ini, tanpa kita sadari setiap masyarakat pengguna media digital juga melakukan komunikasi politik. Misalnya ketika mencari informasi salah satu pejabat baik di Indonesia maupun di dunia(Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014).

6.2 Kasus-Kasus Komunikasi Politik

Untuk kasus-kasus komunikasi politik yang akan kami paparkan dalam buku ini adalah kasus-kasus komunikasi politik di tingkat nasional, dimana lokus kejadian dari proses komunikasi politik ini ada ditingkat pusat atau di level nasional. Sedangkan yang kedua adalah proses-proses komunikasi politik ditingkat lokal, dimana lokus kejadian atau tempat terjadinya proses komunikasi politik ini ada di tingkat lokal. Tingkat lokal disini dapat kita maknasi sebagai pemerintah di tingkat lokal

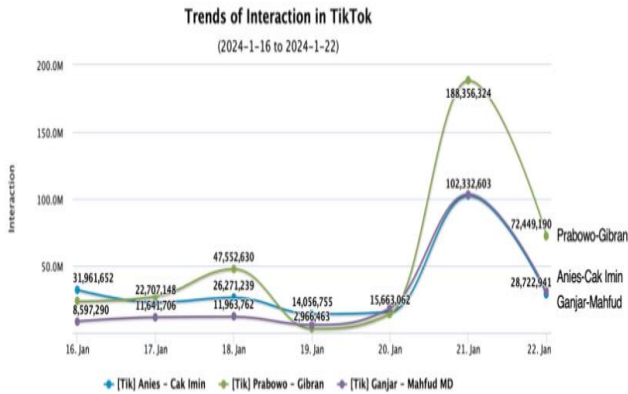
seperti di pemerintah provinsi atau di kabupaten dan kota(Mahardhani, Sulton and Sunarto, 2020). Fenomena politik di tingkat lokal yang lazim kita ketahui biasanya adalah pemilihan kepala daerah.

6.2.1 Kasus-Kasus Komunikasi Politik di Tingkat Nasional

1. Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2024

Dalam kasus Pilpres yang digelar pada Tanggal 14 Februari yang lalu, seperti kita ketahui, Pilpres ini diikuti oleh tiga pasang calon, calon pertama adalah Anies-Muhaimin, calon kedua Prabowo-Gibran, dan calon ke tiga adalah Ganjar-Mahfud MD. Dalam proses pemilihan presiden, hal yang menarik kita amati adalah bagaimana proses komunikasi politik masing-masing pasangan calon atau antar kandidat di media sosial. Sebagaimana kita ketahui, era komunikasi politik kekinian sangat kita kenal dengan era media baru(Indrawan, Efriza and Ilmar, 2020). Adapun hal menarik yang kita amati disini adalah bagaimana proses interaksi mereka lakukan melalui media tik tok. Meskipun banyak kontroversi, media tik tok terbukti ampuh dalam hal menggaet para pemilih(Jonathan, 2023). Selain tik-tok tentu masih ada media sosial lain yang terbukti ampuh dalam menggaet para pemilih. Media sosial tersebut antara lain instagram, X (twitter), face book, youtube dan berbagai aplikasi lainnya. Akan tetapi untuk bagian pertama yang akan kita jadikan tempat analisis adalah media tik tok.(Zhu *et al.*, 2020) .

Adapun dalam proses analisis data ini,mayoritas data kami dapatkan dari platform digital drone empirit. Mengapa kami gunakan data dari drone empirit, ada beberapa alasan yang menyertasi, pertama data dari drone empirit lumayan sangat up date dan cepat dalam menganalisis netizen. Kemudian kedua, pemaparan data sangat sederhana dan memudahkan semua kalangan untuk membaca data yang ditampilkan. Ketiga, data yang ditampilkan sangatlah holistik. Karena latar belakang diatas, maka tidak ada salahnya bila kita banyak memimjam data yang ditampilkan oleh drone empirit.



Gambar 6.1. Total Interaksi Pasangan Capres-Cawapres di Tik-Tok

Sumber : analisis drone emprit.

Total interaksi masing-masing pasangan ini, menurut data dari *drone emprit* pun menunjukkan jumlah yang berbeda. Misalnya, untuk pasangan Anies-Cak Imien mencapai 241,7 juta interaksi. Prabowo-Gibran mencapai 376 juta interaksi dan Ganjar-Mahfud MD mencapai 190, 9 juta interaksi. Adapun jumlah interaksi masing-masing pasangan ini adalah, untuk pasangan Anies-Cak Imin sekitar 30 %, pasangan Prabowo-Ghibran mencapai 47 %, sedangkan Ganjar-Mahfud hanya 24 %. Dari data ini terlihat jika Prabowo-Gibran paling unggul dengan jumlah paling maksimal. Anies-Cak Imin juga terlihat totalitas, meski harus puas di posisi kedua, sedangkan Ganjar-Mahfud harus puas di posisi ke tiga (Fahmi, 2024).

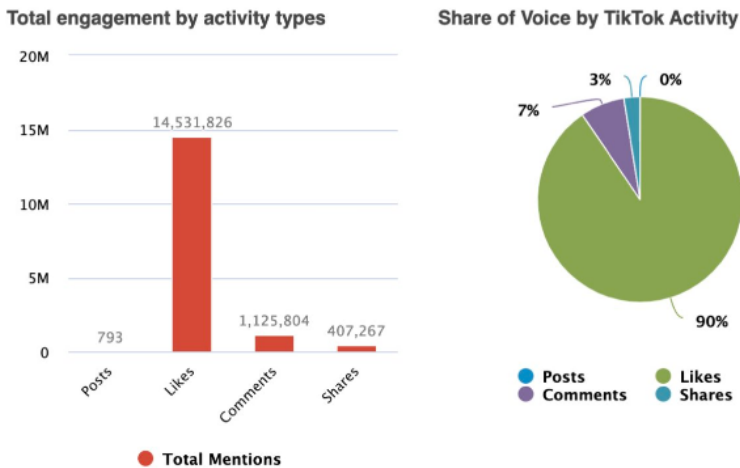
Laporan dari drone emprit ini juga bisa memberi bukti jika Prabowo-Gibran terlihat paling intensif saat hadir dalam berbagai kampanye dan ini terbukti efektif di Tik Tok dalam waktu tersebut. Prabowo-Gibran dan tim kampanye nya lebih kreatif dan mampu menarik perhatian netizen sehingga interaksinya pun lebih banyak diperbincangkan massa. Menariknya konten Prabowo-Gibran ini memberi

bukti jika konten yang menarik dan memiliki resonansi yang bagus lebih diminati oleh pengguna aplikasi dari China ini.

Interpretasi ini bisa menunjukkan bahwa [Tik] Prabowo – Gibran memiliki kehadiran atau kampanye yang sangat efektif di TikTok selama waktu tersebut, menarik lebih banyak perhatian dan interaksi dibandingkan dengan dua kelompok lainnya. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk konten yang lebih menarik atau resonansi yang lebih besar dengan audiens TikTok.

Setelah kita melihat bagaimana proses interaksi antara ketiga kandidat dengan audiens di Tik-Tok, sekarang mari kita lihat bagaimana proses interaksi dan penampilan masing-masing kandidat ketika mereka beraktifitas di tik tok. Adapun pertama yang akan kita analisis adalah pasangan Anies-Muhaimin. Total likes post pasangan ini adalah 793 Likes: 14,531,826 Comments: 1,125,804 Shares: 407,267 Total views adalah 225,650,503. Adapun Total keterlibatan keseluruhan adalah 241,716,193.

TIKTOK ANIES – CAK IMIN

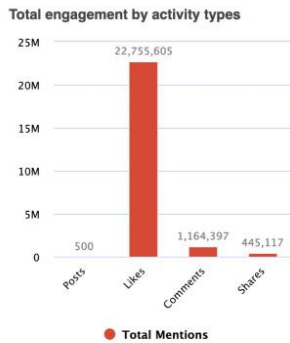


Gambar 6.2. Analisis Pasangan Anies-Cak Imin

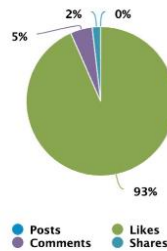
Sumber : analisis drone empirit

Kemudian yang kedua adalah pasangan Prabowo-Gibran. Total postingan pasangan Prabowo-Gibran ada sejumlah 500 postingan. Jumlah like untuk pasangan ini mencapai 22.755.605 like, sedangkan jumlah komentar untuk pasangan ini sejumlah 1.164.397. Untuk jumlah akun yang membagikan konten-konten pasangan ini ada 445.117 shares, sedangkan total akun yang melihat untuk pasangan Prabowo-Gibran mencapai 351.692.446 . Adapun total keterlibatan keseluruhan adalah 376,058,065.

TIKTOK PRABOWO-GIBRAN



Share of Voice by TikTok Activity



DroneEmprit

Engagement

Posts
500

Likes
22,755,605

Comments
1,164,397

Shares
445,117

Views
351,692,446

Total
376,058,065

Interaction rate
48730.24

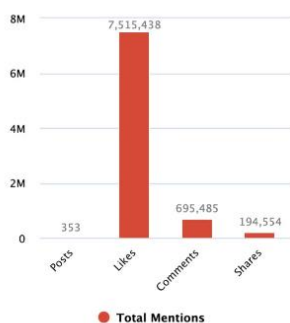
Gambar 6.3. Analisis Pasangan Prabowo-Gibran
Sumber: Drone Emprit

Ketiga adalah pasangan Ganjar-Mahfud MD. Jumlah postingan pasangan ketiga ini adalah 353 postingan, jumlah orang yang menyukai pasangan ini ada 7.515.438 likes, dengan jumlah orang yang memberi komentar terhitung 695.485 komentar, adapun jumlah orang yang membagikan postingan ini mencapai 194.554 shares dengan total orang yang menonton postingan ini mencapai 182. 545. 690 viewer dengan angka total keterlibatan keseluruhan adalah 190,951,520.

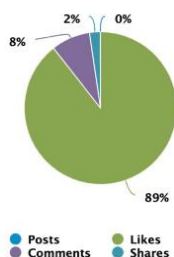
TIKTOK GANJAR-MAHFUD MD

DroneEmprit

Total engagement by activity types



Share of Voice by TikTok Activity



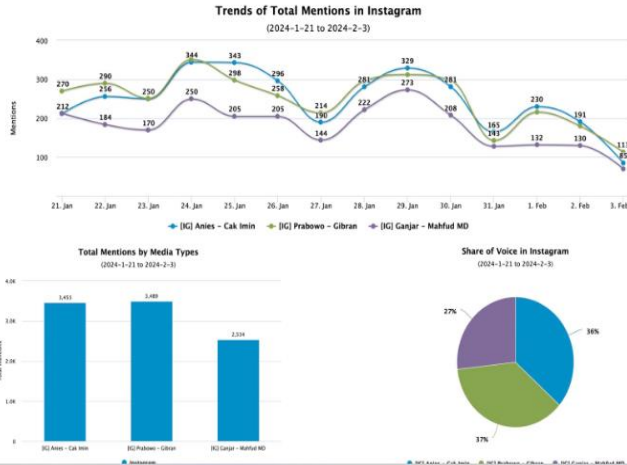
Engagement

Posts
353
Likes
7,515,438
Comments
695,485
Shares
194,554
Views
182,545,690
Total
190,951,520
Interaction rate
23811.55

Gambar 6.4. Analisis Pasangan Ganjar-Mahfud
Sumber: Drone Emprit.

Berikutnya kita akan melihat proses komunikasi politik para kandidat melalui media instagram. Metode yang digunakan oleh drone emprit atau DE adalah metode IG search yang berbasis hastags atau #. Periode pengampilan data ini antara tanggal 21 Januari hingga 3 Februari 2024. Post dapat dipahami sebagai video atau gambar yang di unggah netizen di instagram dimana mengandung hastags tertentu. Dari grafik dibawah ini, terlihat jelas jika pasangan nomer urut 1 dan nomer urut 2 secara bergiliran menempati posisi atas dalam jumlah postingan di instagram untuk periode 21 Januari hingga 3 Februari 2024. Adapun pasangan nomer urut 3 menempati urutan ketiga. Untuk total postingan di periode ini jumlah postingan pasangan nomer urutt 01 ada 3.453 postingan, pasangan nomer urut 2 ada 3.489 postingan, sedangkan pasangan nomer urut 3 mencapai 2.534 postingan. Kemudian dari total postingan ini diperoleh tingkat persentase post yang mengandung kata kunci untuk masing-masing paslon sebagai berikut: Paslon 01: 36% Paslon 02: 37% Paslon 03: 27%.

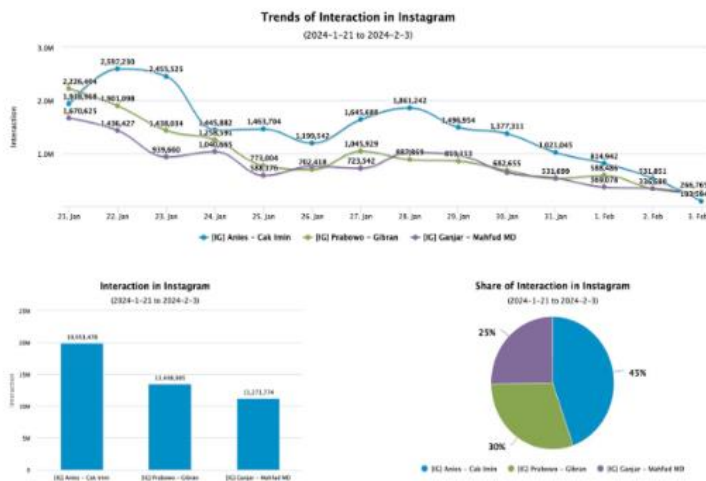
TOTAL POSTS (MENTIONS)



Gambar 6.5. Analisis Total Post Kandidat Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024
Sumber data: drone emprit

Kemudian untuk jumlah total interaksi. Total interaksi ini adalah jumlah like dan komentar dari keseluruhan gambar dan video yang muncul ketika kita melakukan penelusuran melalui kata-kata tertentu di insagram. Dari data ini, tren dalam penelusuran periode 21 Januari hingga 3 Februari 2024, pasangan nomer urut 1 selalu berada pada posisi puncak dengan total interksi mencapai angka 19,9 juta. Sedangkan pasangan nomer urut 2 di posisi kedua dengan angka 13, 5 juta dan pasangan nomer urut tiga berada di posisi ketiga dengan angka total interaksi mencapai 11, 3 juta. Dari total interaksi ini, diperoleh persentase untuk masing-masing calon kandidat yaitu: Paslon 01: 45% Paslon 02: 30% Paslon 03: 25%

TOTAL INTERACTIONS



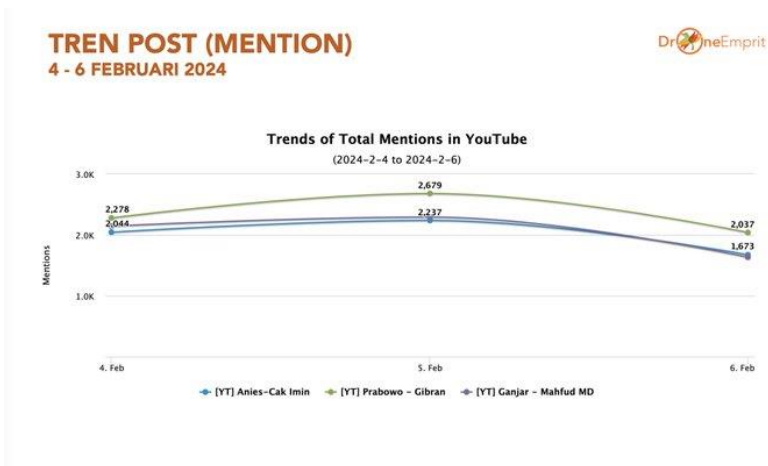
Gambar 6.6. Total Interaksi Ketiga Pasang Kandidat
Sumber data: analisis drone empirit

Membandingkan Ketiga Pasang Kandidat Pasca Debat di Youtube.

Melihat dan menganalisis ketiga pasang kandidat melalui media sosial instagarm dan tik tok, sudah kita lakukan. Kini saatnya kita melakukan riset mendalam melalui big data dengan menganalisis media sosial youtube. Adapun kata kunci yang kita lakukan untuk menganalisis calon adalah Amin, Anies, Anies Baswedan, Cak Imin untuk pasangan nomer urut 1, kemudian prabowo gibran untuk nomer urut 2 serta Ganjar Mahfud untuk nomer urut tiga.

Paslon Anies-Cak Imin memulai dengan jumlah penyebutan paling sedikit di periode 4 hingga 6 Februari. Tetapi kemudian naik pada tanggal 5 Februari dan kemudian kembali turun pada Tanggal 6 Februari. Sedangkan pasangan kandidat Prabowo-Gibran memiliki jumlah penyebutan yang paling banyak selama tiga hari, dengan sedikit penurunan dari tanggal 5 ke 6 Februari. Sedangkan paslon Ganjar-Mahfud MD memulai dengan

jumlah penyebutan tertinggi peringkat kedua pada 4 Februari dan mengalami kenaikan beberapa saat, hingga mencapai jumlah penyebutan terendah di antara ketiganya pada 6 Februari.



Dari total penyebutan pasangan Prabowo-Gibran memiliki jumlah penyebutan tertinggi dengan total 6,994. Pasangan Anies-Cak Imin memiliki jumlah penyebutan kedua tertinggi dengan total 5,954. Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud MD memiliki jumlah penyebutan ketiga tertinggi dengan total 6,068. Sedangkan ketika kita melihat dari distribusi "*Share of Voice*" adalah sebagai berikut: pasangan Anies-Cak Imin memiliki porsi sebesar 31%. Pasangan Prabowo-Gibran memiliki porsi terbesar dengan 37% dan yang terakhir pasangan Ganjar-Mahfud MD memiliki porsi sebesar 32%.

Dari "*Share of voice*" yang tidak terlalu jauh bedanya, dapat disimpulkan bahwa pertarungan di YouTube antara ketiga paslon berlangsung sangat ketat. Tidak ada pemenang yang jauh berbeda secara signifikan. Namun demikian pasca debat terakhir, Paslon 02 paling tinggi jumlah video dan interaksi yang didapatkannya.

2. Di antara semua kanal YouTube, kanal-kanal dari TV memberi kontribusi jumlah interaksi yang paling tinggi. Ada beberapa kanal non-TV yang juga signifikan seperti kanal podcast dan kanal opini.
3. Debat politik dan acara terkait kampanye merupakan konten yang paling banyak menarik perhatian, sebagaimana ditunjukkan oleh jumlah tayangan dan komentar yang tinggi pada video-video terkait.
4. Segmen penutup paling banyak mendapat interaksi. Dari Capres 01, saat Anies membacakan ayat dari Quran dan pesan yang menyentuh. Dari Capres 02 saat meminta maaf kepada paslon lain. Dari Capres 03 cenderung direspon negative karena menyindir.
5. Konten yang memungkinkan pemirsa untuk terlibat secara emosional atau pribadi, seperti wawancara atau segmen yang menampilkan sisi humanis dari calon, juga menarik jumlah tayangan yang tinggi.

6.2.2 Analisis Kasus Pilpres: Berebut Pengaruh di Ruang Digital

Dewasa ini kedekatan teknologi hampir dengan semua aspek kehidupan dapat dirasakan. Mulai dari ekonomi, pariwisata, sosial budaya hingga politik. Dalam aspek politik, teknologi dan politik telah menghasilkan berbagai terminologi seperti *digital dictatorship*, *hacking the electorate*, *how our democracy is hijacked*, *algopopulism* hingga *digital repression* (Ambardi, 2023). Banyaknya diksi-diksi negatif ini bisa jadi mengindikasikan jika proses infiltrasi teknologi dalam politik adalah hal buruk yang benar-benar harus dihindari. Dalam kaitannya dengan fenomena pilpres di ruang digital, sebenarnya adalah hal yang biasa terjadi dinegara-negara yang sudah maju demokrasinya.

Setidaknya ada tiga prasarat, agar persaingan itu bisa berlaku adil. Pertama, semua penyelenggara pemilu yang terlibat dalam kontestasi ini bersifat netral, jujur dan adil tidak

memihak salah satu pasang calon tertentu. Kedua, semua kandidat dan pendukung kandidat bisa berlaku jujur dan tidak terus menerus menyebar hoax maupun berita bohong. Ketiga, hal ini akan berlaku positif bila semua calon yang berkompetisi bisa menghindari untuk tidak menggunakan *digital corporate power*.

Komunikasi politik di era digital mengharuskan setiap calon memiliki tim sukses yang tak hanya mahir bertempur dilapangan secara nyata, tapi lebih canggih lagi, tim sukses di dunia maya yang menjadi penentu bagaimana mengarahkan gaya komunikasi dari para kandidat yang diusung. Mulai dari memetakan isu-isu yang digemari pemilih, menambang atau mining data, merancang isu hingga melempar isu atau bahkan mencover isu balasan. Misalnya ketika dalam perdebatan, Ganjar Pranowo melempar isu internet gratis lebih dibutuhkan daripada makan siang gratis, maka dengan seketika, jutaan akun di berbagai media sosial ramai-ramai melawan wacana yang digaungkan Ganjar Pranowo.

Kuskrido Ambaradi, sosiolog UGM memberi argumentasi, bagaimana proses demokrasi agar bertahan di ruang digital. Pertama, terbukanya ruang publik dan kedua adalah ketersediaan informasi yang menjadi bahan baku bagi para pemilih untuk bisa mendapatkan formasi opini serta terlibat dalam berbagai proses pembuatan keputusan secara individu (Ambardi, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, K. (2022) 'E-Demokrasi: Problem Menjinakkan Dogital Leviathan', in *Demokrasi Tanpa Demos*, p. 234.
- Ambardi, K. (2023) *Disrupsi Teknologi Dan Redistribusi Kekuasaan di Era Digital*.
- Fahmi, I. (2024) *Analisis Konten dan Interaksi Pasca Debat Kelima di TikTok*.
- Indrawan, J., Efriza and Ilmar, A. (2020) 'KEHADIRAN MEDIA BARU (NEW MEDIA) DALAM PROSES KOMUNIKASI POLITIK', *MEDIUM* [Preprint]. Available at: [https://doi.org/10.25299/medium.2020.vol8\(1\).4820](https://doi.org/10.25299/medium.2020.vol8(1).4820).
- Jonathan, D. (2023) 'Penyalahgunaan Media Sosial dalam Komunikasi Politik dapat Membahayakan Demokrasi', *Nomos: Law Review* [Preprint].
- Mahardhani, A.J., Sulton, S. and Sunarto, S. (2020) 'PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (KAJIAN DI KABUPATEN PONOROGO)', *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p59-62>.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014) 'Pengertian Komunikasi Politik', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, pp. 1–25.
- Zhu, C. *et al.* (2020) 'How health communication via tik tok makes a difference: A content analysis of tik tok accounts run by Chinese provincial health committees', *International Journal of Environmental Research and Public Health* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.3390/ijerph17010192>.

BIODATA PENULIS



Dr. Iswadi, M.Pd

Dr. Iswadi, M. Pd merupakan Dosen Universitas Esa Unggul yang lahir di Desa Mesjid Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh pada tanggal 01 November 1979. Merupakan putra kelima dari sembilan bersaudara dari pasangan M. Amin dan Hamidah. Mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Muara Tiga, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie dan lulus pada tahun 1994, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Muara Tiga, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie dan lulus pada tahun 1997, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Muara Tiga, Kabupaten Pidie dan lulus pada tahun 2000. Melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Serambi Mekkah dan lulus pada tahun 2005, Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) di Institut Perguruan Darul Aman Malaysia dan lulus tahun 2006, pendidikan Magister Administrasi Pendidikan (S2) di Universitas Syiah Kuala dan lulus pada tahun 2009, pendidikan Doktor (S3) Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta lulus pada tahun 2020.

Sejak tahun 2004 – 2008 menjadi Staf Pengajar di Pesantren Oemar Dian Indrapuri Aceh Besar (2004), SMA Negeri 5 Banda Aceh (2005-2006), SMA Negeri 4 Banda Aceh (2007), SMA Negeri 10 Fajar Harapan (2007), MAS Ruhul Islam Anak Bangsa (2007), dan SMA Lab School Unsyiah. Sejak tahun

2006, sekembali dari studi di Malaysia telah diangkat menjadi Dosen Tetap Universitas Serambi Mekkah Aceh. Namun, tetap aktif mengajar di PTS lainnya seperti Universitas Abulyatama Aceh, Universitas Iskandar Muda Aceh, STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh, Akademi Kebidanan Saleha Banda Aceh, Dosen tetap di STKIP Kusuma Negara Jakarta sekaligus dosen lepas di Universitas Mr. Moestopo (beragama) Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana (STIE Tribuana) Bekasi dan sejak tahun 2022 telah pindah unit kerja menjadi Dosen Tetap di Universitas Esa Unggul, Jakarta. Di bidang birokrasi akademik pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III FKIP Universitas Serambi Mekkah Aceh. Di bidang politik pernah menjabat sebagai Ketua Rumah Kreasi Indonesia Hebat Provinsi Aceh periode 2014-2019, yaitu salah satu organisasi relawan Jokowi-JK pada saat pilpres tahun 2014 lalu dan sukses bersama tim mewujudkan kemenangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Saat ini, juga menjabat sebagai Pembina Yayasan Al-Mubarrak Fil-Ilmi dan Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI). Di bidang pendidikan pernah menjadi Koordinator Tim Perumus Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI Tahun 2015. dan bersama tim akademisi sudah berhasil merumuskan prosiding dan jurnal dari karya-karya guru se-Indonesia.

BIODATA PENULIS



Dr. Muhammad Yusuf AR., S.Ag., M.I.Kom

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar, Makassar

Lahir di Bantaeng, 05 Februari 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar (Unifa), Makassar. Pendidikan S1 diselesaikan pada Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam IAIN Alauddin, 1995. Melanjutkan S2 pada Jurusan Media dan Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Jakarta selesai pada 2012. Menyelesaikan studi Program Doktorat Jurusan Dirasah Islamiah dengan konsentrasi Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, Makassar pada 2024.

Penulis saat ini aktif mengampu mata kuliah Manajemen Media Elektronik dan Komunikasi Politik, juga mengajar pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi di Unifa. Sehari-hari selain mengajar, tetap aktif melakoni profesi sebagai praktisi media, terutama dunia penyiaran sebagai Host dan Produser Eksekutif. Sebelum menjadi Pemimpin Redaksi sekaligus Direktur PT Fajar Makassar Televisi sejak 2011 silam, pernah mendapat amanah sebagai Wakil Direktur Produksi dan SDM PT Media Fajar. Jabatan itu diembannya paralel sebagai Wakil Pemimpin Redaksi Harian FAJAR.

Selama berkarir di Fajar Tv, berhasil memproduksi beberapa program acara televisi, antara lain: "INSIDE" (*Setiap*

Orang adalah Inspirasi), “Meja Redaksi”, “D’Warkop” (*Diskusi Warung Kopi*), dan “Bicara Politik” (*Karena Kekuasaan untuk Rakyat*). Sebagai jurnalis, Penulis adalah pemegang sertifikat Wartawan Utama Dewan Pers sejak 2012 dan menjadi tim Penguji Kompetensi Jurnalis sejak 2013, yang bernaung di bawah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. (^)

BIODATA PENULIS



Maulana Malik Ibrahim

(Direktur Eksekutif Indonesia Sosial-Politik Review Institute)

Maulana Malik Ibrahim, lahir di Surabaya, 30 November 1999 dan merupakan seorang lulusan S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Jakarta. Sekarang, penulis sedang melanjutkan pendidikannya pada jenjang Pascasarjana dengan mengambil kepakaran Filsafat Pancasila di Universitas Negeri Jakarta. Penulis aktif di beberapa kegiatan organisasi dan pencerdasan politik anak muda lewat Jakarta Mendunia—organisasi kepemudaan, pendidikan, dan ketenagakerjaan- dan Indonesia Sosial-Politik Review Institute sebagai Direktur Eksekutif. Selain itu, penulis juga aktif menulis di beberapa media serta menulis prosiding buku; diantaranya:

- “Antara Corona, Ekonomi Politik, dan Dagelan”, diterbitkan oleh platform Pinterpolitik pada tahun 2021.
- “Badut Politik dan Manuver Giring Eks-Nidji”, diterbitkan oleh platform Pinterpolitik pada tahun 2021.
- “Bambang ‘Pacul’ Wuryanto: Fenomena Power Paradox dan Klientelisme Pemilu di Indonesia?”, diterbitkan oleh platform Bangsa Mahardika pada tahun 2023.
- Prosiding “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, bagian “Hak Asasi Manusia”, diterbitkan oleh Get Press Indonesia pada tahun 2023.
- Prosiding “Pengantar Ilmu Politik”, bagian “Demokrasi”, diterbitkan oleh Get Press Indonesia pada tahun 2023.

- Penulis dan Editor buku “Politik Indonesia Kontemporer”, diterbitkan oleh UNJ Press pada tahun 2023.

BIODATA PENULIS



Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

Penulis dilahirkan di Yogyakarta, 9 Juni 1981 adalah doktor administrasi publik serta dosen tetap di Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar. Penulis mendapatkan gelar Sarjana di Universitas Jenderal Soedirman Jurusan Administrasi Negara tahun 2004. Gelar Master diperoleh pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi di Universitas Jenderal Soedirman tahun 2010. Gelar doktor pada Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro tahun 2023. Mata kuliah yang diampu antara lain Statistika Sosial, Sistem Politik Indonesia, MPS Kuantitatif, Metode Penelitian Administrasi Negara, Manajemen Sumber Daya Manusia serta *E-Governance*. Fokus penelitiannya selama ini antara lain pada bidang reformasi birokrasi, manajemen pelayanan publik dan *e-government*. Buku yang pernah diterbitkan antara lain: (1) Metode Penelitian Sosial Kuantitatif; (2) Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi; (3) Manajemen Sumber Daya Manusia; (4) Demokrasi Di Tingkat Lokal: Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Walikota; (5) *E-Government* Dalam Perspektif Pengguna: Konsep, Teori dan Perkembangannya dan; (6) Pelayanan Publik. Penulis dapat dihubungi melalui nomor 081327039155 dan melalui email jokotrinugraha@untidar.ac.id.

BIODATA PENULIS



M. Nur Rofiq Addiansyah, S.IP., M.A.

Dosen Program Studi Pemikiran Politik Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
Institut Agama Islam Negeri Kudus

Penulis lahir di Blora tanggal 5 Februari 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP dan melanjutkan S2 pada Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM Penulis menekuni bidang menulis sejak SD. Berbagai literatur fiksi maupun jurnal ilmiah telah ia hasilkan. Moto hidupnya adalah *however long the nite, the dawn will break*.